ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 - 2016 DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH



Oleh:

TIARA ROCHMAWATI NIM.: 15913197

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2018

ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 - 2016 DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH



Oleh:

Tiara Rochmawati

NIM.: 15913197

Pembimbing:

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

> YOGYAKARTA 2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Tiara Rochmawati

NIM

: 15913197

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Judul Tesis

: ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT

INDEX (I-HDI) DI KOTA YOGYAKARTA DALAM

PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Yang menyatakan,

F3AFF343663-68

BURUPIAH

Liara Kocnmawati



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta

Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2048/PS-MSI/Peng./X/2018

TESIS berjudul: ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-

HDI) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015/2016 DALAM

PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH

Ditulis oleh : Tiara Rochmawati

N. I. M. : 15913197

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

Ketua,

Dr. Junanah, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama

: Tiara Rochmawati

Tempat/tgl lahir: Mahato Sakti, 8 Agustus 1993N. I. M.

: 15913197

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Judul Tesis

: ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-**TAHUN 2015-2016** HDI) DI KOTA YOGYAKARTA

DALAM PERSPEKTIF MAQĀŞID SYARĪ'AH

Ketua

: Dr. Yusdani, M.Ag

Sekretaris

: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM

Pembimbing

: Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag

Penguji

: Dr. Sidik Tono, M.Hum

Penguji

: Dr. Siti Achiria, S.E.,MM.

Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Oktober 2018

Pukul

: 09.30 - 10.30 WIB.

Hasil

: Lulus

Mengetahui Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Junanah, MIS



NOTA DINAS

No.: 1816/PS-MIAI/ND/X/2018

TESIS berjudul: ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-

HDI) DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF

MAQASHID SYARI'AH

Ditulis oleh

: Tiara Rochmawati

NIM

: 15913197

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Ketua,

Dr. Junanah, MIS

PERSETUJUAN

Judul Tesis : ANALISIS ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-

HDI) DI KOTA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF

MAQĀŞID SYARĪ'AH

Nama :

: Tiara Rochmawati

NIM

: 15913197

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu

Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018

Pembimbing,

Dr.Rahmani Timorita, Y., M.Ag.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Orang-orang terpenting dalam perjalanan hidupku,
Ayahanda H. Ahmad Syahril dan Ibunda Hj.lis Elis
Abah dan Amih tercinta.
ketiga adikku tersayang.
Dan siapa saja yang telah mendo'akanku
dengan ikhlas semoga Allah membalas segala kebaikannya.

MOTTO

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوْتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلنَّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱللَّهَ عَلَى مَتْعُ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَندَهُ حُسْنُ ٱلْمَ أَابِ اللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَ أَابِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

(Q.S.Ali 'Imrān 03:14)

¹ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 51.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nome	Unnuf I atin	Votorongon
Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ŗ	Bâ'	b	be
ij	Tâ'	t	te
ٿ	Sâ	ŝ	es (dengan titik di atas)
E	Jim	j	je
۲	Hâ'	ķ	ha (dengan titik di bawah)
て さ	Khâ'	kh	ka dan ha
٢	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
J	Râ'	î	er
j	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
m	Syin	sy	es dan ye
ش ص ض	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	(koma terbalik di atas
ع غ ف	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
<u>5</u>	Kâf	k	ka
J	Lâm	1	'el
م	Mîm	m	'em
ن	Nûn	n	'en
9	Wâwû	W	W
٥	hâ'	h	ha
۶	hamzah	(apostrof
ي	yâ'	У	ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis Karāmah al-auliyā
--

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul-fitri

D. Vokal pendek

	ditulis	a
<u>0</u>	ditulis	i
<u>ੰ</u>	ditulis	u

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
1.	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
۷.	تنسى	ditulis	tansā
3.	Fathah + yā' mati	ditulis	ī
٥.	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
4.	فروض	ditulis	furū.ḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + yā' mati	ditulis	ai
1.	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + wāwu mati	ditulis	au
۷.	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرأن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	As - Sama'
ااشَّىمس	ditulis	asy- Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

ANALISIS *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI) DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2016 DALAM PERSPEKTIF *MAQĀŞID SYARĪ'AH*

Tiara Rochmawati

NIM: 15913197

I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan paling mendasar dalam diri manusia menurut Islam yang orientasinya erat dengan nilai-nilai kemaslahatan. Imam al-Syātibi berpendapat bahwa kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal dasar *kulliyat al-khamsah*, yaitu agama(*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*al-,,aql*), keluarga, keturunan (*an-naṣl*), dan material (*al-māl*).

Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran I-HDI melalui perspektif maqāṣid syarī'ah Imam al-Syātibi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data statistik sosial ekonomi yang di ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan rentang waktu pengamatan selama 2 tahun yaitu dari tahun 2015-2016, dengan obyek penelitian adalah Kota Yogyakarta. Tekhnik analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles Hubberman yang dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil pencapaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang di ukur dengan perhitungan I-HDI melalui perspektif maqāṣid syarī'ah pada tahun 2015-2016 sudah mencerminkan adanya penerapan nilai maqāṣid syarī'ah pada masing- masing indeks komponen meskipun belum tercapai sepenuhnya.

Kata Kunci: Human Development Index (HDI), Islamic Human

Development Index (I-HDI), Maslaḥah, Maqāṣid Syarī"ah.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI) OF YOGYAKARTA 2015-2016 THROUGH MAQĀŞID SYARĪ'AH

Tiara Rochmawati

Student Registration Number: 15913197

I-HDI mainly measures the level of human welfare based on the fulfillment of the most basic needs in human beings according to Islam which is closely oriented with the values of benefit. Imam al-Shātibi argued that the basic need for human life consists of five basic things ($kulliyat\ al-khamsah$), namely religion ($ad-d\bar{n}$), soul (an-nafs), intellectual (al-'aql), family, descendants (an-nasl), and material ($al-m\bar{a}l$).

This is a qualitative research with a descriptive approach, aiming to describe the results of I-HDI measurement through the perspective of *maqāṣid syarī'ah* by Imam al-Syātibi. It used secondary data in the form of socioeconomic statistical data the Yogyakarta City Central Bureau of Statistics over the period of 2 years, from 2015-2016. The research object was the city of Yogyakarta. To analyze data, the researcher used Miles Hubberman interactive model carried out through three procedures, namely data reduction, data presentation and conclusion.

On the basis of the analysis of human development in the city of Yogyakarta measured by the calculation of I-HDI through the perspective of maqāṣid syarī'ah in 2015-2016, it is revealed that there has been good application of the *maqāṣid syarī'ah* value in each component index even though it has not been fully achieved.

Keywords: Human Development Index (HDI), Islamic Human Development Index (I-HDI), Maslahah, Maqāsid Syarī"ah.

Oktober 3, 2018

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الخبير خلق الإنسان وعلّمه البيان واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها بالعدل والقسط، وأفضل الصّلاة وأتمّ التّسليم على المبلغ الأمين الهادي إلى الصّراط المستقيم سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه وسائر الصّالحين. وبعد:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan pertolongannya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Ṣalawāt beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun tesis ini berjudul "Analisis Islamic Human Development

Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta dalam Persepektif Maqāṣid Syarṭah" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan, motivasi, bimbingan, kritik, saran, bantuan dan doa dari berbagai pihak, penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

- Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 3 Ibu Dr. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- 4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku ketua Prodi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing tesis yang selalu memberikan dukungan, arahan, serta membantu penulis menyelesaikan tesis.
- 5. Ibu Dr. Rahmani Timorita, Y., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran maupun kritik, kepada peneliti.
- Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta wawasan kepada peneliti,terkhusus bapak Dr.Drs Nur Feriyanto, M.Si selama masa studi maupun selama penulisan tesis ini.
- 7. Abah W.Soewardi dan Emih Soewartini tersayang yang do'anya telah menghantarkanku sampai pada titik ini, dengan segala dukungan dan semangatnya yang selalu menjadi alasanku dalam penyelesaian tesis ini.
- 8. Ayah H. Ahmad Syahril dan Ibunda Hj. Iis Elis Solehat tercinta yang selalu melangitkan do'a untuk putra-putrinya, memberikan kepercayaan, serta mengenalkan pendidikan iman dan ihsan, kalian adalah profesor terbaik dalam hidupku yang pernah kumiliki. Serta adik-adikku penyejuk mata dan hati, Fathur Rohman, Khoirul Anwar, dan Wardatul Jannah, semoga kakak bisa menjadi teladan yang baik untuk kalian.
- 9. Seluruh keluarga besar dan sepupuku, Teh Neng Eka, Teh Yeni Listia Dwi, Kak Resti Astuti, Kak Mirda Juliani, Bang Ade Kurnia, adikku Ismiyatul Rahmah, Selsi Sartika, Teh Betry, Teh Rima, Bang Wildan, Bang Fadil yang tidak bisa tertulis semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan dalam hidup.
- 10. Sahabat-sahabatku, kak Pipin, Umi Mahmadatun, My twins Febi, haniku Yassir Hayati, Vitul-ku, adik terbaikku Its imeh yang banyak berkontribusi waktu dan tenaga, Mufida, Sakinah, Ratih Banchin, terimakasih untuk motivasi, kritik, saran, semangat,dan do'a serta canda-tawa yang telah menghiasi hari-hari dalam lembaran hidupku dengan penuh warna selama di Kota Pelajar teristimewa Yogyakarta.

11. Semua teman-teman seperjuangan Konsentrasi Ekonomi Islam angkatan 2016 khususnya tim delapan perempuan hebat yang telah mengisi hari-hari selama masa studi serta motivasi dan do'anya dalam penyelesaian tesis ini, Soleha, Neng Tazkiyah, Danik, Salmia, Mbak Wifa, Mbak Iis, dan Ayesa.

12. Teman-temanIKAPDH(Ikatan Alumni Pesantren Dar-El Hikmah) Wil. Yogyakarta terkhusus angkatan XV, teman-teman HMPRY (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau Yogyakarta, IPRY (Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta-Kom Rokan hulu), serta teman-teman Tilawah Al-Mizan 2016, yang telah menjadi tempat pelarian paling aman dan menenangkan dari hiruk pikuk tugas selama proses studi.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu terimakasih untuk bantuan yang pernah diberikan.

Yogyakarta, 1 Oktober 2018 Peneliti

Tiara Rochmawati

DAFTAR ISI

HALAM	IAN	JU	DUL	ii
HALAM	IAN	I PE	ERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAM	IAN	I PE	ENGESAHAN	iv
HALAM	IAN	ΙΤΙ	M PENGUJI TESIS	v
HALAM	IAN	N(OTA DINAS	vi
HALAM	IAN	I PE	ERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAM	IAN	I PE	RSEMBAHAN	viii
HALAM	IAN	I M	OTTO	ix
HALAM	IAN	I PE	EDOMAN TRANSLITERASI	X
ABSTR	AK			xiv
ABSTR	AC7	Γ		XV
KATA F	PEN	GA	NTAR	xvi
DAFTA	R IS	SI		xix
DAFTA	R T	AB	EL	xxi
DAFTA	R G	AM	IBAR	xxii
BAB I	PE	ND	AHULUAN	1
	A.	La	tar Belakang Masalah	1
	B.	Fo	kus dan Pertanyaan Penelitian	9
	C.	Tu	juan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
	D.	Sis	stematika Pembahasan	11
BAB II.	KA	ΔJΙΑ	AN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
	TE	OR	I	13
	A.	Ka	jian Penelitian Terdahulu	13
	B.	Ke	rangka Teori	31
		1.	Konsep Indeks Pembangunan Manusia (HDI)	31
		2.	Capaian HDI	34
		3.	Komponen Penyusunan HDI	35
		4.	Keterbatasan HDI	38
		5.	Konsep Islamic Human Development Index (I-HDI)	39

		6. Konsep <i>Maqāṣid Syatī 'ah</i> asy-Syaṭibi	46				
	C.	Kerangka Berfikir	65				
BAB III.	M	METODE PENELITIAN					
	A.	Jenis Penelitian & Pendekatan	66				
	B.	Subjek dan Objek Penelitian	67				
	C.	Sumber Data	67				
	D.	Teknik Pengumpulan Data	68				
	E.	Keabsahan Data	69				
	F.	Tekhnik Analisis Data	70				
BAB IV	. НА	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73				
	A.	Gambaran Umum Kota Yogyakarta	73				
	B.	Pencapaian I-HDI di Kota Yogyakarta Berdasarkan <i>maqāṣid</i>					
		syariah	84				
	C.	Perbandingan Pencapaian antara HDI dan I-HDI di Kota					
		Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Maqāṣid Syarī'ah	107				
BAB V.	PE	NUTUP	120				
	A.	Kesimpulan	120				
	B.	Saran-saran	121				
DAFTA	R P	USTAKA	122				
LAMPIF	RAN	N-LAMPIRAN					
DAETAI	D D	IWA VAT LIDID					

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Agama Tahun 2015-2016, 8.
- Tabeel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan, 25.
- Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum HDI, 36.
- Tabel 2.3 Indikator I-HDI, 40.
- Tabel 2.4 Indikator yang Diusulkan dalam Kesejahteraan Holistik, 40.
- Tabel 4.1 Luas Wilayah Yogyakarta menurut Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Air Laut (hektar)Tahun 2016, 75.
- Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta (Persen) 2012-2016, 79.
- Tabel 4.3 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Penduduk Kota Yogyakarta, 86.
- Tabel 4.4 Rasio Gini Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 87.
- Tabel 4.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P¹) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P²) Penduduk Kota Yogyakarta Tahun2015-2016, 88.
- Tabel 4.6 Angka Kriminalitas Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 92.
- Tabel 4.7 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 98.
- Tabel 4.8 Angka Partisispasi Sekolah Penduduk Kota Yogyakarta, 102
- Tabel 4.9 Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS), 102.
- Tabel 4.10 Angka Kelahiran Total Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 105
- Tabel 4.11Angka Kematian Bayi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 106.
- Tabel 4.12 Komponen Pencapaian HDI Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 107.

Tabel 4.13 Komponen I-HDI Berdasarkan Ukuran Materi (*Material Welfare Index*) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 108.

Tabel 4.14 Komponen I-HDI Berdasarkan Ukuran Non Materi (*Non Material Welfare Index*) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016, 108.

Tabel 4.15 Perbandingan Pengukuran HDI dan I-HDI, 109

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Subtansidan ragam maqasid,52.
- Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian,64.
- Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif,71.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan dengan *Human Development Index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut UNDP konsep pembangunan manusia menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*A process of enlarging people's choices*"). Pilihan-pilihan yang dimaksudkan oleh UNDP tersebut ialah terpenuhinya angka harapan hidup, angka pendidikan, dan angka standar hidup layak.

Munculnya pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dicanangkan oleh *United Nations Development Programe* (UNDP) pada tahun 1990 merupakan sebuah bentuk kritikan dan sekaligus perbaikan terhadap penggunaan angka pendapatan per kapita sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang pada awalnya hanya memfokuskan pada aspek ekonomi saja, padahal disisi lain ada aspek yang juga perlu diperhatikan dalam mencapai kesejahteraan yaitu dengan mengukur aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

¹*Human Development Report*, 1995.

Maka untuk mengatasi kekurangan ini beberapa negara termasuk Indonesia mulai menggunakan parameter indeks pembangunan manusia sebagai alat ukur yang dikombinasikan dari tiga unsur penting dari sebuah kesejahteraan penduduk. Sehingga pencapaian pembangunan manusia tersebut ialah ditandai dengan tercapainya angka penduduk sehat dan berumur panjang, berpendidikan, dan akses sumberdaya yang dapat memenuhi standar hidup layak. Untuk mengukur ketiga hal tersebut, digunakan indeks komposit berdasarkan tiga parameter yang kemudian dikenal dengan *human devlopment index* (HDI).

Konsep pembangunan manusia yang dicirikan dengan peran manusia sebagai agen pembangunan mewajibkan penduduk suatu negara ataupun daerah memiliki peluang berumur panjang dan sehat, memiliki tingkat pendidikan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif.² Pembangunan manusia menjadi kunci untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dalam memperluas pilihan. Pilihan tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat berumur panjang dan sehat, memiliki ketrampilan yang memadai dan memiliki peluang untuk merealiasasikan pengetahuan yang dimiliki.

²Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta:UPP Stim Ykpn, 2014), hlm. 218.

Menurut Lanjouw dan Sparrow pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan, hal ini dikarenakan pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya karena aset terpenting mereka adalah tenaga mereka.

Menurut konsep lingkaran kemiskinan yang dikenalkan oleh Nurske, pada fase yang ketiga yaitu tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat yang relatif rendah dapat tercermin pada rendahnya *human development index* (HDI) yang akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja suatu penduduk yang berimbas pada rendahnya pendapatan yang diperoleh.

Pada dasarnya angkatan kerja yang baik dan berpendidikan tinggi berkontribusi dalam membangun suatu fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang lebih cepat dan berekesinambungan. Menurut Sacks, sukses ekonomi di Amerika Latin telah dihambat oleh konflik sosial akibat disebabkan oleh ketidakmerataan pendapatan. Ketidakmerataan pendapatan menyebabkan terhambatnya produktivitas pertumbuhan yang cepat dan berkesinambungan dan menyebabkan sebagian orang tidak bisa menikmati sejumlah pendidikan, kesehatan karena berada pada kondisi ekonomi yang serba kekurangan.

Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu

³Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), Alih Bahasa Ikhwan Abidin Basri, hlm. 63.

ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif, menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi, menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin, serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.⁴

Dengan tercukupinya sejumlah pendapatan penduduk maka mereka dapat memiliki kemampuan untuk melakukan daya beli dan konsumsi. Konsumsi yang dimaksud dalam ekonomi Islam tentunya lebih mengarah terhadap nilai-nilai ajaran *syarjah* yang orientasi utamanya adalah kemaslahatan, dimana pencapaian Maslaḥah tersebut merupakan tujuan dari *maqāṣid syarjah*. Seperti al-Juwayni termasuk ulama pertama yang menggunakan istilah *maqāṣid* dan *Masalih al-Ammah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim. *Maslaḥah* yang di dalamnya penuh dengan pertimbangan nilai-nilai rasional normatif dan positif di ruang publik yang tidak begitu tersentuh dalam pembangunan secara umum.

Sementara tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif dan holistik baik di dunia dan di akhirat. Dasar-dasar filosofis pendekatan Islam dalam pembangunan adalah: *Tauhid, Rububiyyah, Khilafah, Tazkiyah*. Berdasarkan

⁴Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 399-400.

⁵Jaser Audah, *Maqashid Al-Shariah; Abeginners Guide*", Alih Bahasa Ali Abdelmon'im, Al-Maqashid Untuk Pemula, (Yogyakarta; Suka Press, 2013), hlm. 6.

pada pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi akan memiliki karakter yang komprehensif dan mencakup aspek moral, spiritual, dan material.⁶

Pengukuran HDI yang dianggap telah memenuhi dalam mengukur sebuah kesejahteraan suatu penduduk nyatanya masih memiliki kritikan. Kritikan tersebut mengenai basis ideologi dalam HDI yang bersifat egalitarian (kecenderungan cara berpikir bahwa seluruh penduduk diperlakukan oleh pemerintah ataupun mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah) dan miskin terhadap pemikiran terkait tekhnologi merupakan kritikan terhadap HDI.⁷

Sehingga konsep yang ditawarkan UNDP dalam mengukur tingkat pembangunan manusia dengan menggunakan HDI mungkin dapat menjadi indikator yang paling komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Arah teori dan konsep yang mendasari dalam membangun HDI tidak didasarkan pada *maqāṣid syarṭah*. Oleh karena itu untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan lebih tepat jika dilakukan dengan menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), di mana teori dan konsepnya berdasarkan pada perspektif Islam.⁸

⁶Ahmad Ausaf dalam Haqiqi Rafsanjani Analisis *Islamic Human Development Index* di Indonesia", (Surabaya: UNAIR, 2014), hlm. 5.

⁷ Indeks Pembangunan Manusia, 2015, hlm. 11.

⁸Haqiqi Rafsanjani, Analisis *Islamic Human Development Index* Di Indonesia, (Jurnal Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga: Surabaya,2014), hlm. 8.

Pada tahun 2012 HDI Kota Yogyakarta mampu mencapai angka HDI sebesar 83,29 yang menunjukkan bahwa pencapaian tersebut menurut standar UNDP adalah kategori tinggi akan tetapi, disisi lain terjadi ketimpangan pada indeks keparahan kemiskinan (P²) yang mencapai angka 0,37 merupakan angka tertinggi selama periode 2011-2016. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Fenomena ini menujukkan bahwa pada saat tingginya pencapaian indeks HDI belum dapat memastikan bahwa pengukuran I-HDI juga tinggi.

Pengukuran I-HDI yang dibangun dari konsep *maqāṣid syarṭah* menurut Imam asy-Syatibi bahwa kebutuhan dasa manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual ('*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*māl*). Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.¹⁰

Keadilan dan kemaslahatan yang ditampilkan secara nyata dalam rupa indeks pembangunan manusia menjadi barometer seberapa kuat kualitas

⁹Https://www.Bps.go.id./Subject/23/kemiskinan-dan ketimpangan.html diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Oktober 2018, jam 22.39 WIB.

¹⁰P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cetakan Keempat. hlm, 5-6.

syari'ah dalam suatu agenda pembangunan ekonomi manusia berbasis hukum Islam (maqāṣid syarjah). Padahal dalam ekonomi syari'ah melingkupi kemaslahatan dan keadilan, dan hal tersebut erat kaitannya dengan pembangunan manusia yang ingin diwujudkan dalam maqasid syarjah.

Laporan Tahunan United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa Human Development Index (HDI) negara-negara yang berpenduduk Muslim masih rendah. Rendah dalam tingkat literasi (*Literacy*), tingkat pendidikan (*Education*), partisipasi politik dan ekonomi ditambah lagi standar hidup yang layak. 11

Jasser juga sedang mengarahkan *maqāṣid* menuju *human development* sebagai obsesinya dalam mengekspresikan Maslahah (public interst). Karena menurutnya *Maslaḥah* ini harusnya menjadi sasaran *maqāṣid*. Realisasi dari maqāsid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui human development index dan human development targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia seperti Persyerikatan Bangsa-bangsa (PBB).¹²

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta karena HDI kota Yogyakarta memiliki nilai HDI yang paling tinggi diantara beberapa Kabupaten lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 $^{^{11}\}mathrm{M.Syamsudin},$ Ilmu Hukum Profetik, (Yogyakarta : FH Uii Pres, 2013), hlm.176. $^{12}Ibid.,$ hlm. 203.

Berikut dapat dilihat pada tabel 1.1. pencapaian HDI tahun 2015-2016 pada kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.1 HDI Kabupaten DIY Tahun 2015-2016

Kabupaten/ Kota	2015				2016					
	AHH	HL S	RL S	PP P	HDI	AH H	HLS	RL S	PP P	HDI
Kulonprogo	75,0 0	13, 55	8,4	8,6 88	71,52	75, 03	13,97	8,5 0	8.9 38	72,38
Bantul	73,4 4	14, 72	9,0	14, 320	77,99	73, 50	14,73	9,0 9	14. 88 0	78,42
Gunungkidul	73,6 9	12, 92	6,4	8,3 36	67,41	73, 76	12,93	6,6 2	8.4 67	67,82
Sleman	74,5 7	15, 77	10, 30	14, 562	81,20	74, 60	16,08	10, 64	14. 92 1	82,15
Kota Yogyakarta	74,2 5	16, 32	11, 41	17, 317	84,56	74, 30	16,81	11, 42	17. 77 0	85,32

Sumber: IPM 2015 dan 2016, BPS DIY.

Selain dari itu, peneliti menghubungkan pembangunan manusia dengan maqāṣid syarṭah adalah karena orientasi yang ingin dituju adalah maqāṣid maslaḥah dan keadilan. Kedua hal tersebut juga merupakan ruang kajian yang dikaji oleh ekonomi syari'ah dalam mencapai maslaḥah. Dimana arah kajian maqāṣid baru yang dipelopori oleh Jasser Auda lebih menekankan pada development (pembangunan dan pengembangan) dan right (hak-hak).

Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan maka penelitian ini relevan bila dilakukan di Kota Yogyakarta dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia melalui konsep I-HDI dalam perspektif Islam atau yang lebih dikenal dengan maqāṣid syarṭah. Oleh karena itu penelitian ini berjudul "Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) di Kota Yogyakarta dalam Persepektif Maqāṣid Syarṭah". Harapannya dengan tercapainya indeks pembangunan manusia yang tinggi secara pengukuran (HDI) tersebut, Kota Yogyakarta juga memiliki nilai pencapaian I-HDI yang sesuai dengan harapan syarṭah yang mengutamakan maslaḥah dan keadilan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini ialah terhadap perhitungan I-HDI yang berisi berupa: data angka kriminalitas, rasio gini, pengeluaran perkapita, angka kelahiran total dan kematian bayi, pengeluaran perkapita dan data lainnya yang mendukung dan mencerminkan pengukuran I-HDI. Sementara HDI digunakan untuk mengukur perbandingan pencapaian pembangunan antara I-HDI dan HDI penduduk kota Yogyakarta pada tahun 2015-2016.

1. Bagaimana pencapaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta tahun 2015-2016 yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan pada *Maqāsid Syariah*?

2. Bagaimana perbandingan hasil dari pengukuran pembangunan manusia di Kota Yogyakarta tahun 2015-2016 dengan menggunakan metode perhitungan HDI dan I-HDI berdasarkan *Maqāsid Syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian.
- a. Menganalisis hasil pencapaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta tahun 2015-2016 yang diukur dengan perhitungan I-HDI berdasarkan pada Maqāṣid Syarjah.
- b. Menganalisis perbandingan hasil dari pengukuran pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan HDI dari konsep *Maqāsid Syariah* Asy-Syatibi.
- 2. Manfaat Penelitian
- a. Secara akademis : Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmiah mengenai pembangunan manusia secara islami (I-HDI) yang dilihat dari sebuah perspektif *Maqāṣid Syarjah* yang dipelopori oleh Asy-Syaṭibi.
- b. Secara praktis: Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan, mengevaluasi, dan memperbaiki kebijakan dalam meningkatkan pembangunan manusia (I-HDI) yang sesuai konsep Maqāṣid Syarjah meskipun sistem Pemerintahan tidak menerapakan model pemerintahanan Islami.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I

Bab pertama merupakan pemaparan latar belakang masalah beserta alasan peneliti mengangkat tema penelitian mengenai *islamic human development index* (I-HDI) di Kota Yogyakarta, alasan mengambil tempat di Kota Yogyakarta. Serta alasan peneliti mengaitkan I-HDI di Kota Yogyakarta dengan menggunakan analisa perspektif *Maqāṣid Syarjah*. Pada bab ini juga peneliti memaparkan mengenai fokus pertanyaan penelitian serta batasan ruang lingkup kajian pembahasan yang diteliti berdasarkan tema penelitian.

BAB II

Pada bagian bab dua, dimana peneliti memaparkan secara singkat bagaimana hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Sehingga pada bagian ini dijelaskan dimana letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain memaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu, pada bab ini juga berisi pemaparan mengenai kerangka teori dan teori pokok yang digunakan peneliti dalam menganalisis hasil penelitiannya.

BAB III

Bagian bab tiga berisi rancangan metode untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian meliputi jenis penelitian dan pendekatan,

subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV

Bagian bab empat berisi hasil temuan-temuan peneliti dilapangan dan akan dianalisis dan dibahas secara detail dan mendalam. Bagaimana pembangunan manusia di Kota Yogyakarta dengan menggunakan indikatorindikator I-HDI. Setelah hasilnya diketahui maka pada bab ini peneliti menganalisis bagaimana status Kota Yogyakarta dan perbandingan antara HDI dan I-HDI yang dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

BAB V

Dan terakhir pada bagian bab lima dimana peneliti menarik sebuah kesimpulan atas jawaban dari fokus pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan apa yang peneliti lakukan dan mencoba memberikan solusi alternatife atau saran untuk daerah penelitian maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu digunakan oleh setiap peneliti untuk mengetahui gambaran tentang penelitian serupa yang pernah dilakukan. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut setiap peneliti tentu menemukan perbedaan yang tidak sama persis dalam hal mengamati obyek penelitiannya. Peneliti mengamati dari sudut pandang yang berbeda-beda hingga menjadi sebuah penelitian yang dapat dibaca maupun dijadikan literatur oleh peneliti selanjutnya melalui berbagai sudut pandang dengan berbagai corak model penelitian.

Tugas peneliti selanjutnya adalah menemukan atau merumuskan kembali apa yang belum secara rinci dijelaskan maupun diangkat dalam penelitian terdahulu. Adapun dalam penelitian ini peneliti menyadari ini bukanlah satusatunya penelitian yang baru karena sudah ada penelitian sebelumnya yang serupa tetapi berbeda dalam menggunakan metode analisisnya. Dalam beberapa kajian penelitian terdahulu yang peneliti gunakan diantaranya adalah:

MB. Hendri Anto, membangun sebuah konsep baru dalam pengukuran HDI dalam bentuk yang lebih komperhensif untuk mengukur HDI yang lebih bernuansa *syarī'ah* atau yang dikenal I-HDI yang dibangun melalui konsep *maqāṣid syarī'ah* imam asy-Syaṭibi mengenai kebutuhan dasar dalam diri

manusia. Kebutuhan dasar tersebut terdiri dari lima dimensi *maqāṣid syarī'ah* yang di pakai dalam komponen perhitungan I-HDI, antara lain: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berikut indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: Faith Index berupa wujud dari semangat beragama yang dilihat dari jumlah masjid, puasa, zakat, haji, dana amal, tingkat kriminalitas, tingkat korupsi, dan tingkat kekerasan. Life Index berupa wujud dari menjaga jiwa dengan melihat rata-rata usia harapan hidup pengguna narkoba dan perokok. Science Index atau yang lebih dikenal dengan upaya menjaga akal berupa tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan jumlah hak Family-social Index sebagai upaya menjaga keturunan jumlah keluarga, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat perceraian. Property Index dengan melihat GDP per kapita, pertumbuhan ekonomi, GDP per pertumbuhan penduduk, rasio gini, dan tingkat kemiskinan. Selain dari yang lima tersebut ia juga menambahkan indeks tambahan berupa kebebasan berpolitik dan kebebasan ekonomi. paten. 1

Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat, menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia dengan menggunakan metode Kointegrasi. Berdasarkan

¹MB. Hendrianto, "Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development In OIC Countries", *Islamic Economic Studies Journal*, Vol.19. No. 2, 2009.

hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia provinsi-provinsi di Indonesia. Secara umum, variabel pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia selama periode tahun 2004-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dan yang terendah adalah provinsi Gorontalo.²

Nadia Ayu Bhakti, mengnalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia di Indonesia Periode 2008-2012 melalui PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga untuk makanan, APBD untuk pendidikan, dan APBD untuk kesehatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.

Sementara, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia menjadi arah dan kebijakan pembangunan. Hal ini secara

²Eka Pratiwi Lumbantoruan Dan Paidi Hidayat, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 2. No. 2, (2014), hlm. 14.

langsung berkaitan dengan alokasi dana APBD untuk pendidikan tidak merata antar provinsi di Indonesia.³

Fatkhul Mufid Cholili, meneliti Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia. Hasil penelitiannya memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Meningkatan PDRB sebenarnaya diperlukan dan menjadi pilihan, namun tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Haqiqi Rafsanjani meneliti mengenai pendeskripsikan hasil pengukuran I-HDI. Penelitiannya menggunakan waktu pengamatan selama 3 tahun yaitu selama tahun 2010 – 2012, dan yang menjadi obyek penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia. Hasil pencapaian pembangunan dari 33 provinsi di Indonesia yang di ukur dengan perhitungan I-HDI menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori pencapaian

³Nadia Ayu Bhakti Dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012 "*Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* – Volume 18, Nomor 4, (Desember 2014), hlm. 452.

⁴Fatkhul Mufid Cholili, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)", *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, (2014).

pembangunan menengah bawah (jika di ukur dengan menggunakan skala internasional). Hasil perhitungan juga menunjukkan disparitas yang sangat jauh antara peringkat I-HDI tertinggi dengan peringkat I-HDI terendah.

Sementara itu, beberapa perbandingan yang di dapat antara hasil perhitungan HDI dan I-HDI diantaranya yaitu: 1) Menurut hasil penelitiannya sebaran nilai I-HDI lebih bervariatif dari pada HDI, 2) nilai I-HDI menunjukkan disparitas antar provinsi lebih besar dari pada HDI, 3) terjadi perbedaan rangking dari 33 provinsi antara HDI dan I-HDI, 4) terakhir terjadi perbedaan status pembangunan antara HDI dan I-HDI.⁵

Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisno, meneliti pengaruh komponen indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh bahwa indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.⁶

⁵Haqiqi Rafsanjani, "Analisis *Islamic Human Development Index* di Indonesia", *TESIS*, Surabaya: UNAIR, 2014.

⁶Nyoman Lilya Santika Dewi Dan I Ketut Sutrisna, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Issn: 2303-0178, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 3, (Maret 2014),hlm. 106 – 114.

Mohammad Bintang P, dkk, meneliti determinan Indeks Pembangunan Manusia melalui sebuah analisa pendekatan Maqasid Syarī'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara OKI). Hasil estimasi pengujian *Data Panel Regression* menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Negara- negara OKI dengan menggunakan analisis pendekatan *Maqaşid Syarī'ah* Al-Ghazali adalah: *Hifz'Aql*, Hifz *Nafs*, *Hifz Nasl.Hifz aql* dengan mengamati dari jumlah institusi, pendidikan,kaum wanita terdidik dan partisipasi sekolah Dasar dan menengah. *Hifz nafs* salah satu indkator yang digunakan dalam penelitiannya adalah dengan melihat angka kematian pasca persalinan,pelegalan aborsi dan prostitusi. *Hifz māl* dilihat dari GDP/Capita serta gini rasio.⁷

Putu Gede Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung, meneliti dengan menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dalam meningkatkan indeks pembanguna manusia. Setiap daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diduga sumber pendapatan yang disebutkan mampu memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasilnya pengujian

⁷Nyoman Lilya Santika Dewi Dan I Ketut Sutrisna, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Issn: 2303-0178, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 3, (Maret 2014),hlm. 106 – 114.

menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.⁸

Karimatul Khasanah, meneliti hukum *Ekonomi Syarī'ah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kapitalisme Global, (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)*. Berdasarkan penelitiannya ia memaparkan bahwa rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi Syarī'ah dalam Dunia perekonomian Syarī'ah tampaknya masih cenderung berkutat pada sisi formal- legal kurang menyentuh substansial-filosofis.

Perekonomian Syarī'ah seharusnya diperjuangkan,sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata Syarī'ah yang sakral dan bermakna mulia tersebut. Fenomena ini merekomendasikan bahwa hukum ekonomi Syarī'ah sangat urgen untuk direvitaformasikan. Revitaformasi menghendaki revitalisasi dan reformasitas hukum ekonomi Syarī'ah yang berlandaskan dan berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Fauziah Gitri Destilunna Dan Ismaini Zain, Pengaruh Dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan, Serta UMKM Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

⁸Mohammad Bintang P Dan Nurizal Ismail Dan Indra., "Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqāṣid SyarĪ'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara Oki)", *Jurnal Eksyar*, Volume 02, Nomor 02, (November 2015), hlm. 512-534.

⁹Karimatul Khasanah "Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kapitalisme Global, (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", *Al-Manahij* Vol Ix No 2, (Desember 2015), hlm. 319.

Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel Dan Biplot. Variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM antara lain variabel rasio siswaguru SMP dan MTs, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP,SMA, kepadatan penduduk, PDRB UMKM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). IPM provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terbukti pada tahun 2008 hingga 2011 berturut-turut nilainya adalah 70,38; 71,06; 71,62; dan 72,18.

Akan tetapi faktor pendidikan yang menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi IPM tidak diiringi dengan peningkatan IPM. Pada tahun 2008, tingkat melek huruf orang dewasa pria dan wanita di Jawa Timur adalah 92 dan 83 persen yang artinya lebih rendah dari tingkat melek huruf nasional yaitu 95 dan 89 persen atau DKI Jakarta dengan 99,6 dan 97,9 persen. Sementara faktor kesehatan di Jawa Timur menunjukkan peningkatan selama dekade terakhir. Angka harapan hidup di Jawa Timur meningkat dari 65 pada tahun 1997 menjadi 71 pada tahun 2007. 10

Siske Yanti meneliti, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara(Studi Pada Tahun 2002-2013). Data yang di gunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu 2002-2013 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Dengan

¹⁰Fauziah Gitri Destilunna Dan Ismaini Zain, "Pengaruh Dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan,Serta Umkm Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel Dan Biplot", *Jurnal Sains Dan Seni Its* Vol. 4, No.2, (2015) hlm. 2337-3520.

kesimpulan dari hasil uji kausalitas kedua variabel tersebut adalah Ho di tolak artinya kedua variabel tersebut mepunyai hubungan dua arah arah, Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan kausalitas dengan indeks pembangunan manusia dan sebaliknya, indeks pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi.¹¹

Hastu Sarkoro, meneliti pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan secara parsial bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu Belanja Daerah dan hipotesis keempat (H4) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H1 dan H4 diterima.

Sedangkan, hipotesis kedua (H2) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan hipotesis ketiga (H3) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H2 dan H3 ditolak. Sedangkan, secara simultan bahwa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan

¹¹Siske Yanti Maratade Dkk, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara(Studi Pada Tahun 2002-2013)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01,(2016),hlm. 328.

Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 12

Lavenia Kotambunan, dkk, menganalisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005- 2014). Memaparkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan dan signifikan secara statistik. Pengaruh tersebut tidak sesuai dengan teori, hal ini disebabkan karena masih ada program-program pemerintah yang dianggap masih belum tepat sasaran dan program pemerintah belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya belum efektif.

Selain itu, program yang ada juga dinilai masih bersifat reaktif, berjangka pendek dan parsial. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan hasil estimasi menunjukkan apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.01433% cateris paribus. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dibahas diatas yaitu jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik maka Kemiskinan akan turun.¹³

¹²Hastu Sarkoro,"Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014), *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 1no.(1), (2016), hlm. 62.

¹³Lavenia Kotambunan, Dkk ," Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 01, (2016), hlm. 925.

Ratih Nurmalasari,dkk, mengnalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014). Hasil penelitiannya menunjukkan Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA dan banyaknya sarana kesehatan. Nilai ketepatan klasifikasi metode regresi logistik ordinal adalah sebesar 80% dan nilai ketepatan klasifikasi metode regresi probit ordinal adalah sebesar 80%. Nilai AIC metode regresi logistik ordinal sebesar 1,158521% dan nilai AIC regresi probit ordinal sebesar 1,155612%. Dari hasil perbandingan ketepatan klasifikasi dan AIC antara metode regresi logistik ordinal dengan regresi probit ordinal dapat disimpulkan bahwa metode regresi logistik ordinal sama baiknya dengan metode regresi probit ordinal dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2014. 14

Terakhir, Maya Masita Septiarini meneliti Analisis I-HDI (*Islamichuman Development Index*) Di Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2010-2014, dan diukur dengan skala internasional, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk dalam ketegori status

¹⁴Ratih Nurmalasari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014)", Issn: 2339-2541 *Jurnal Gaussian*, Volume 6, Nomor 1, (2017), hlm. 111-120.

pembangunan menengah ke bawah. Selain itu, terjadi disparitas yang cukup jauh antara nilai I-HDI tertinggi dengan yang terendah. Perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan I-HDI dan HDI, di lihat dari perbedaan peringkat tiap kabupaten/kota yang mana dalam HDI berada di peringkat atas namun di hasil perhitungan I-HDI berada di peringkat bawah, juga perbedaan status pembangunan yang dicapai, jika dari perhitungan HDI sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam kategori status pembangunan menengah atas sedangkan dari hasil perhitungan I-HDI masuk dalam ketegori status pembangunan menengah bawah. 15

Berdasarkan 15 kajian penelitian terdahulu maka adapun letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penjelasan tabel 2.1 berikut :

¹⁵Maya Masita Septiarini, Analisis I-HDI (*Islamic human Development Index*) Di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 5 Mei 2017: 381-395.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1. MB,Hendri Anto, Introduction an Islamic Human Development Index (I- HDI) to Measure Development OIC Countries. Dalam per membahas m Human Dev yang dibangur pengukuran pembangunan teori dan berdasarka I Islam. Pengu		Dalam penelitiannya ia membahas mengenai <i>Islamic Human Development Index</i> yang dibangun dengan sebuah pengukuran baru tentang pembangunan manusia yang teori dan konsepnya	Penelitian sebelumnya menjadi dasar rancang bangun konsep dalam menganalisis penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Konsep tersebut peneliti gunakan sebagai dasar teori dari analisis I-HDI yang akan diteliti. Akan tetapi pada
		Maqāṣid Syarī'ah yang kemudian di pakai dalam komponen perhitungan I-HDI, antara lain: angka kriminalitas, tingkat kekerasan,tingkat korupsi,tingkat pendidikan, jumlah lembaga pendidikan agama,tingkat kelahiran dan kematian dan lain sebagainya.	penelitian selanjutnya peneliti tidak menggunakan rumus yang digunakan dalam mengukur status I-HDI, alasannya karena masing-masing indikator masih dapat berubah, belum ada standar baku yang resmi seperti konsep HDI yang dirancang UNDP.
2.	Eka Pratiwi Lumbantoruan dan Paidi Hidayat., Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi).	Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Secara umum,variabel pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia selama periode tahun 2004-2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dan yang terendah adalah provinsi Gorontalo. Kondisi IPM provinsi-provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata IPM tertinggi selama periode 2004-2011 adalah provinsi	Penelitian tersebut menggunakkan analisis tipologi Klassen. Variabel pertumbuhan ekonomi dijadikan variabel independen untuk mengukur seberapa jauh pengaruhnya terhadap IPM. Namun pada penelitian selanjutnya peneliti tidak menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi sebagai parameter dalam mengukur pembangunan manusia.

		Sulawesi Utara dan yang terendah adalah provinsi Papua.	
3.	Nadia Ayu Bhakti dkk, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012.	Hasil penelitiannya memaparkan PDRB berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia.Rasio ketergantungan berpengaruh negatif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia.	Penelitian tersebut mencari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM melalui PDRB. Sedangkan pada penelitian selanjutnya tidak memfokuskan arah kajian pada PDRB akan tetapi, hanya melihat fenomena pembangunan manusia yang ada di kota Yogyakarta kemudian dianalisis dengan I-HDI yang indikatorindikatornya mendekati nilai-nilai yang diterapkan Maqāṣid Syarī'ah.
4.	Fatkhul Mufid Cholili, Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia).	Hasil penelitiannya memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (<i>R-Square</i>). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran secara simultan maupun secara parsial. Sedangkan penelitian selanjutnya mengnalisis angka IPM hanya sebagai perbandingan dengan pencapaian angka I-HDI.
5.	Haqiqi Rafsanjani, Analisis <i>Islamic</i> <i>Human Development</i> <i>Index</i> Di Indonesia.	Penelitiannya memaparkan bahwa Hasil pencapaian pembangunan dari 33 provinsi di Indonesia yang di ukur dengan perhitungan I- HDI menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia masuk dalam kategori pencapaian pembangunan	Penelitiannya mencoba mengukur hasil perbandingan HDI dan I-HDI yang ada di Indonesia dengan maqāṣid Syanī 'ah. Konsep I-HDI yang digunakannya dibangun dari konsep Maqāṣid Syanī 'ahImam Al-Al-ṣātibi.

		menengah bawah (jika di ukur dengan menggunakan skala internasional).Hasil perhitungan juga menunjukkan disparitas yang sangat jauh antara peringkat I-HDI tertinggi dengan peringkat I-HDI terendah. Sementara itu, beberapa perbandingan yang di dapat antara hasil perhitungan HDI	Penelitian selanjutnya juga akan menggunakan konsep I-HDI imam Al-Al-ṣātibi, akantetapi pada penelitian sebelumnya Rafsanjani tidak menonjolkan analisis <i>Maqāṣid Syan̄ 'ah</i> yang menjadi dasar dari konsep I-HDI yang ia gunakan. Sementara peneitian selanjutnya menekankan analisis <i>Maqāṣid Syan̄ 'ah</i> .
6.	Nyoman Lilya Santika Dewi dan I Ketut Sutrisna, Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.	Berdasarkan hasil olah data, diperoleh bahwa indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.	Penelitiannya memfokuskan pada persentase indikator- indikator IPM yang memiliki tingkat pengaruh terhadap pertumbuhn ekonomi. Sedangkan, penelitian selanjutnya tidak menganalisis hubungan antara masing-masing komponen HDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini bukan untuk mencari pengaruh melainkan menganalisis pencapaian I-HDI Yogyakarta dengan menggunakan konsep maqashid Syarī'ah.
7.	Mohammad Bintang P, dkk, Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqasid Syarī'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara-Negara Oki.	Hasil estimasi pengujian Data Panel Regression menunjukkan bahwa Indeks gini memiliki signifikansi dan berhubungan negatif yang paling besar -0.241739. Sedangkan Variabel yang memiliki signifikansi positif yang paling besar adalah Income Per Capita dengan 0.2161425, kemudian Anggaran Pendidikan (%GDP) dengan 0.0350796.	Penelitian ini mengukur pengaruh pembangunan manusia melalui indeks gini, pendapatan percapita dan anggaran pendidikan di negara-negara OKI dengan pendekatan Maqāṣid Syan̄ 'ahAl- Ghazali. Sementara penelitian selanjutnya menggunakan indeks gini bukan untuk mencari pengaruh tetapi digunakan sebagai indikator dalam melihat tingkat pencapaian I-HDI.

8.	Putu Gde Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui., Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.	Penelitian ini adalah simpulan dari beberapa penelitian yang sama dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU dan DAK dapat meningkatkan IPM. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Penelitian ini menggunakan PAD, DAU, dan DAK sebagai faktorfaktor yang digunakan dalam mengukur tingkat pembangunan manusia. Sedangkan dalam penelitian selanjutnya tidak menggunakan PAD, DAU,dan DAK sebagai faktor yang memiliki
			keterkaitan dalam mempengaruhi tingkat pembangunan manusia.
9.	Karimatul Khasanah., hukum Ekonomi Syarī'ah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kapitalisme Global, (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam).	Berdasarkan penelitiannya ia menunjukkan rumusan teoritik dan praktek hukum ekonomi Syarī'ah dalam dunia perekonomian Syarī'ah tampaknya masih cenderung berkutat pada sisi formallegal kurang menyentuh substansial-filosofis yang justru seharusnya diperjuangkan, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yang dihasilkannya pun cenderung kurang mencerminkan kata Syarī'ah Yang Sakral Dan Bermakna Mulia Tersebut. Fenomena ini merekomendasikan bahwa hukum ekonomi Syarī'ah sangat urgen untuk di revitaformasikan	1 0
10.	Fauziah Gitri, dkk, Pengaruh Dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan, Serta Umkm Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel Dan	IPM provinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, terbukti pada tahun 2008 hingga 2011 berturut-turut nilainya adalah 70,38; 71,06; 71,62; dan 72,18. Akan tetapi faktor pendidikan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi IPM	Penelitian sebelumnya mencari pengaruh dengan menggunakan variabel yang tidak dijadikan alat ukur dalam penelitian selanjutnya dimana ia mengukur UMKM sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian selanjutnya melihat tingkat

	Biplot.	tidak diiringi dengan peningkatan IPM. Sementara faktor kesehatan di Jawa Timur menunjukkan peningkatan selama dekade terakhir. Angka harapan hidup di Jawa Timur meningkat dari 65 pada tahun 1997 menjadi 71 pada tahun 2007.	partisipasi sekolah agama, kelahiran dan kematian ibu dan bayi, serta pengeluaran dalam menganalisis I-HDI.
11.	Siske Yanti Maratade Dkk, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara(Studi Pada Tahun 2002- 2013).	Penelitiannya menyimpulkan adanya hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya Indeks Pembangunan manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi,	Peneliti selanjutnya tidak mencari hubungan kausalitas antar pertumbuhan ekonomi dengan IPM melainkan, menganalisis I-HDI kota Yogyakarta menggunakan indikator yang berbeda.
12.	Hastu Sarkoro ,"Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014).	Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sedangkan, secara simultan bahwa Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	Penelitian selanjutnya tidak menggunakan DAK, DAU dan PAD dalam mengukur IPM melainkan, menggunakan indikator lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Indikator tersebut adalah indikator yang dibangun oleh konsep I-HDI seperti partisipasi sekolah agama,tingkat kriminalitas dan lain sebainya.
13.	Lavenia Kotambunan, Dkk ,"Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014).	Hasil penelitiannya memaparkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan hasil estimasi menunjukkan apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1% maka tingkat	Lavenia mengukur belanja modal dan komponen IPM dalam mempengaruhi kemiskinan. Sementara penelitian selanjutnya jelas berbeda dalam menggunakan indikator yang menjadi parameter dalam I-HDI.

		kemiskinan akan turun sebesar 0.01433% <i>cateris</i> <i>paribus</i> .	
14.	Ratih Nurmalasari, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014.	Hasil penelitiannya menunjukkan Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA dan banyaknya sarana kesehatan.Nilai ketepatan klasifikasi metode regresi logistik ordinal adalah sebesar 80 % dan nilai ketepatan klasifikasi metode regresi probit ordinal adalah sebesar 80 %.Nilai AIC metode regresi logistik ordinal sebesar 1,158521 dan nilai AIC regresi probit ordinal sebesar 1,158521.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian selanjutnya. Perberdaan tersebut terletak pada faktor-faktor yang ingin diketahui dalam mempengaruhi IPM sementara, penelitian selanjutnya bukan membahas faktor-faktor yang menunjang terbentuknya angka tersebut.
15.	Maya Masita Septiarini, Analisis I- HDI (Islamic human Development Index) Di Jawa Timur, tahun 2010-2014.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2010- 2014, dan diukur dengan skala internasional, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk dalam ketegori status pembangunan menengah ke bawah.	Penelitian ini hampir serupa dengan penelitian selanjutnya dimana ia menggunakan alat ukur I-HDI yang merupakan wujud dari maqashid Syarī'ah. Sehingga dalam tahap analisis penelitian Maya Masita ini menjadi tambahan literatur kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan hasil ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu maka terdapat perbedaan dan persamaan yang dijadikan peneliti sebagai gambaran serta acuan untuk menganalisis arah penelitian selanjutnya. Dalam menganalisi hasil penelitian ini peneliti juga mengukur I-HDI berdasarkan konsep yang dibangun dari indikator-indikator yang ditawarkan oleh

MB.Hendri Anto dalam jurnalnya yang di ambil dari konsep *Maqāṣid Syarī 'ah* imam asy-Syaṭibi.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pembangunan Manusia (HDI)

Human Development Index telah diperkenalkan oleh pemenang Nobel India, Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbul ul Haq pada tahun 1990. Sejak itu indeks ini di pakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih berfokus kepada halhal yang lebih sensitif dan berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan (UNDP). Indeks yang ditawarkan ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya (UNDP).

Sementara itu, penghitungan HDI di Indonesia dilakukan atas kerja sama BPS dan UNDP Indonesia pada tahun 1996. HDI yang dihasilkan menunjukkan keterbandingan antar provinsi di Indonesia untuk tahun 1990 dan 1993. Karena Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data penghitungan HDI baru dilaksanakan tahun 1990, maka indeks untuk sebelum tahun tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam publikasi ini, indikator hidup layak yang digunakan adalah pengeluaran riil

per kapita yang disesuaikan (rata-rata provinsi) yang diperoleh dari Susenas dan diukur berdasarkan tahun dasar 1988/1989 (BPS).

Pembangunan manusia yang merupakan wujud lain dari Indeks pembangunan manusia (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Development Index* (UNDP) merupakan, pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. *HDI* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standar kehidupan masyarakat. Istilah "Indeks Pembangunan Manusia" berawal dari konsep pembangunan. Pembangunan manusia yang pengertiannya adalah "proses memperluas rentang pilihan manusia". 16

Menurut Sen pembangunan manusia berawal dari proses pembangunan ekonomi sehingga dapat dilihat sebagai proses perluasan kemampuan. Pembangunan manusia berdasarkan pendekatan yang digunakan oleh Sen berupaya untuk memahami kesejahteraan manusia,

 $^{16} United\ Nation\ Development\ Program\ (UNDP)$, 1990.

_

yang menekankan pentingnya standar hidup yang layak.¹⁷ Dengan penggunaan 3 dimensi kalitas hidup, HDI dapat dinyatakan sebagai indikator holistik yang paling banyak digunakan untuk mengukur status kompratif pembangunan sosio-ekonomi. Untuk melihat tercapainya sebuah pembangunan sosio-ekonomi suatu penduduk dapat tergambar pada sejauh mana IPM mencapai target pada masing-masing indikator.

Angka Pembangunan Manusia berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai HDI, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu: HDI < 50 (rendah), $50 \le$ HDI < 80 (sedang/menengah), HDI \ge 80 (tinggi). Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu¹⁸:

a. Produktifitas

Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

¹⁸ UNDP (*United Nation Development Index*).

¹⁷Amartya Sen dalam Basuki Rahmat ,"Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014, *Tesis*, Yogyakarta: Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, 2016, hlm. 47.

b. Pemerataan

Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

c. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungn selalu diperbarui.

d. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan.

2. Pengukuran Capaian HDI

Sama halnya dengan konsep pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia juga menjadi sebuah konsep yang terukur. Uraian tentang konsep pembangunan manusia pada bagian sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan manusia tidak semata dilihat dari perspektif ekonomi,namun mencakup dimensi yang lebih luas. Sampai

saat ini HDI menjadi indikator komposit yang cukup representatif untuk menggambarkan capaian kualitas pembangunan manusia antar wilayah di Indonesia.

Dalam perkembangannya HDI telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terkait dengan metode perhitungan maupun indikator penyusunannya.. secara umum, HDI disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur dengan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir (*life expentancy at age* 0- atau E0).

Dimensi pengetahuan di ukur dengan dua indikator diantaranya ialah angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (*mean years of schooling*) standar kehidupan layak yang diukur melalui indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) di wilayah yang bersangkutan.¹⁹

3. Komponen Penyusunan HDI

Perhitungan HDI di suatu daerah dapat diperoleh melalui dua tahap perhitungan yaitu tahap pertama melakukan perhitungan indeks masing-masing komponen pembentuk HDI yaitu : indeks angka harapan hidup, indeks tingkat pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Untuk

_

¹⁹ Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016.

menghitung indeks masing-masing komponen NHDI digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.2. berikut ²⁰

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum HDI

Indikator Komponen HDI (=X(i)	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Ctatatan
Angka harapaan hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah	25	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1999	732.720	360.000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan.

Sumber: Standar Perhitungan UNDP

Nilai maksimum dan minimum sesuai standar dari UNDP, Sedangkan *Purchasing Power Parity* (PPP) menggunakan nilai minimum tahun 1999 dan maksimum target yang ingin dicapai sampai akhir PJP 11 tahun 2018. Tahap selanjutnya setelah indeks masing-masing komponen HDI yaitu X_1, X_2 dan X_3 diperoleh maka dilanjutkan dengan menghitung HDI dengan Formula berikut :

HDI: 1/3 (Indeks X₁+ Indeks X₂+Indeks X₃)

Keterangan:

 X_1 = indeks angka harapan hidup

X₂=indeks tingkat pendidikan

²⁰Nur Feriyanto, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yoyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 219.

X₃indeks standar hidup layak

Dalam mengukur pembangunan manusia tiga komponen indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingginya indeks pembangunan manusia suatu negara, masyarakat, penduduk, kelompok sosial tertentu di proksi dalam bentuk : ²¹

- a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan dilihat dari angka harapan lama sekolah usia 15 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah bagi penduduk 25 tahun keatas (dengan bobot dua pertiga).
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita pertahun.

Angka pembangunan manusia (HDI) dengan demikian mencerminkan kerangka kerangka filosofis Maqāşid praksis dari dimanfaatkan dalam ekonomi pembangunan Syan 'ah yang dapat Islam untuk beberapa hal, seperti mengalihkan fokus para pengambil keputusan, media, organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ketika mengukur keadilan dan kemaslahatan agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. Karena HDI diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dengan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria

.

²¹ UNDP (*United Development Index*, 2004).

utama untuk menilai sebuah pembangunan Negara, bukannya pertumbuhan ekonomi semata (kapitalis materialis) yang cenderung parsial.

Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregeat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

4. Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia (HDI)

Dalam implementasinya, HDI juga memiliki keterbatasan. Pertama, mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang memiliki dimensi begitu luas dengan sebuah indeks komposit adalah suatu kemustahilan. Artinya, masih banyak dimensi pembangunan manusia yang belum terangkum dan terukur oleh indeks tersebut. Kedua, IPM masih mempunyai kelemahan dari segi data dan intrepretasi.

Kelemahan yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Jelasnya, HDI suatu negara, provinsi atau kabupaten/kota tidak bermakna tanpa dibandingkan dengan HDI negara, provinsi atau kabupaten / kota lainnya. Ketiga, sebagai sebuah rata-rata, HDI maupun indikator penyusunnya kehilangan informasi mengenai distribusi atau dengan kata lain HDI masih belum

mempertimbangkan unsur kesetaraan gender, perbedaan etnis maupun kawasan.

5. Islamic Human Development Index (I-HDI)

Pada mulanya I-HDI di bangun berdasarkan pada indikatorindikator yang mencerminkan dari kelima dimensi *Maqāṣid Syan̄'ah*imam asy-Syaṭibi. Dimensi tersebut terdiri dari pemeliharaan kebutuhan
dasar, yaitu dengan pemeliharaan terhadap agama (*hifdzu ad-dien*),
pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*), pemeliharaan terhadap akal
(*hifdzu al-'aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan
pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-māl*).

I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai *falah*).

Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

Tabel 2.3 indikator I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Index Dimensi
	Hifdzu ad-Dien	Index ad-Dien
Maslaḥah	Hifdzu an-Nafs	Indekx an-Nafs
	Hifdzu al-'Aql	Index al-'Aql
	Hifdzu an-Nasl	Index an-Nasl
	Hifdzu al-Māl	Index-al-Māl

Sumber: MB Hendri Anto, 2009.

Dari kelima indeks tersebut maka dibuatlah indeks yang mewakili masing-masing dari indeks. Indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur kelima dimensi yaitu: *index ad-dien* yang mewakili dimensi agama, *index an-nafs* yang mewaili dimensi umur panjang dan sehat, *index al-'aql* yang mewakili dimensi pengetahuan, *index an-nasl* yang mewakili dimensi keluarga dan keturunan, dan *index al-māl* yang mewakili dimensi pendapatan. Berikut pada tabel 2.4 indikator yang diusulkan oleh MB.Anto dalam kesejahteraan holistik.

Tabel 2.4 Indikator yang diusulkan dalam kesejahteraan Holistik

Kesejahteraan	Dimensi	Indeks	Indikator usulan	
		Dimensi		
Kesejahteraan			1. Pengeluaran perkapita	
Material Index	Hifz Māl	Index <i>Māl</i>	disesuaikan (PPP Rupiah).	
(WMI)			2. Rasio Gini	
			3. Indeks kedalaman kemiskinan	
			(P1) dan Keparahan	
			Kemiskinan (P2)	
Kesejahteraan	Hifz din	Indeks din	1. Angka kriminalitas.	
Non-Material	Hifz 'aql	Indeks 'aql	1. Harapan Lama Sekolah	
Index (WNMI)			2. Rata-Rata Lama Sekolah	
	Hifz Nafs	Indeks Nafs	1. Angka harapan hidup	
	Hifz Nasl	Indeks Nasl	Angka kelahiran total	
			2. Angka kematian bayi	

Sumber: MB.Hendri Anto, 2009. Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Developmen in OIC Countries, disesuaikan.

Kelima indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk mengukur dari kelima dimensi *Maqāṣid Syan̄'ah*. Nilai dari kelima indeks yang telah diusulkan di atas akan di hitung berdasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan dari masing-masing dimensi *Maqāṣid Syan̄'ah*. Penjelasan dari masing-masing indeks dimensi dengan indikator yang diusulkan yaitu sebagai berikut.

a. Hifdzu ad-Dien (Perlindungan Agama)

Dalam Islam sangat menjaga kebebasan dan hak, kebebsan yang dimaksud adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab yang diyakininya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh dipaksa untuk berpindah dari keyakinan asalnya untuk memeluk Islam. Dasar hal ini jelas tertulis dalam firman Allah dalam Q,s al-Baqoroh : 256 berikut:

Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. ²²

Selain itu bentuk kepedulian seseorang dalam menjaga agama juga dapat tercermin dari penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam menegakkan Islam. Berikut sesuai firman Allah dalam Q.s.Al-Imran:104.

_

²² Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 42.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²³

Dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi ad-dien. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi hifdzu ad-dien diantarannya adalah: Jumlah masjid, jumlah orangorang yang menjalankan ibadah puasa,jumlah muzakki yang diharapkan, jumlah jamaah haji, jumlah anak yang mendaftar sekolah agama, jumlah tingkaat kriminalitas dan lain sebagainya.

b. *Hifdzu an-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Menjaga jiwa dalam wujud menjaga kehidupan dalam Islam sangat dianjurkan. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang sangaat mengecam sesorang yang tidak menjaga dirinya dengan baik atau menyia-nyiakan kehidupan yang dijalaninya. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁴

Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaiknya segala sesuatu yang

_

²³ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

mengancam kehidupan (menimbulkan kematian ataupun merusak kehidupan) pada dasarnya harus dijauhi.

Untuk mengukur dimensi hifdzu an-nafs, maka di bentuk index annafs dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi an-nafs. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi hifdzu an-nafs diantarannya adalah; angka harapan hidup, drug prevalance dan smoking prevelance.

c. *Hifdzu al-'Aql* (Perlindungan akal)

Dalam penafsiran kontemporer melindungi *aql* lebih diartikan kepada upaya-upaya menghindari diri dari taklid. Sehingga upaya mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya merupakan salah satu upaya menjaga *aql* sesuai yang diinginkan *Maqāṣid Syarī 'ah* dalam menjaga aqal sebagai dasar kebutuhan dasar manusia. Untuk mengukur dimensi *hifdzu al-'aql*, maka di bentuk *index al-'aql* dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi *al-'aql*. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi *hifdzu al-'aql* diantarannya adalah; dengan melihat tingkat pendidikan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan tingkat literasi.

d. *Hifdzu an-Nasl* (Perlindungan Keluarga/keturunan)

Menjaga keturunan dalam Islam juga menjadi hal urgensi yang dianjurkan. Untuk menjaga kontinuitas kehidupan tersebut, maka Islam

mengharuskan manusia memelihara keturunan dan keluarganya (*nasl*). Eksistensi manusia tersebut dapat tetap terjaga dan berlanjut hanya bila keluarga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini di bahas dalam firman Allah dalam Q.s.An-Nisa:1 berikut:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kam.,"(Qs:4:1).²⁵

Beberapa indikator yang berdimensi positif terdiri dari: angka reproduksi kasar, rata-rata jumlah kelahiran, angka kelahiran total, dan anak lahir hidup. Beberapa indikator yang berdimensi negatif terdiri dari: tingkat perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian anak.

e. *Hifdzu al-Māl* (Perlindungan harta)

Kehidupan manusia tidak pernah jauh dari yang berkaitan dengan harta, karena harta menjadi salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia. Hal ini juga sudah dijelaskan oleh Allah dalam QS.Al-Kahfi : 46 berikut.

77.

 $^{^{25}\}mbox{Al-Qur'an dan Terjemah, cet.1,} (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm.$

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِيٰتُ ٱلصَّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

" Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".²⁶

Selain itu, hampir semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak, sedekah, haji, menuntut ilmu, dll. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *index almāl. Index al-māl* merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Secara umum, indikator-indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu indikator yang mewakili kepemilikan atas harta, pertumbuhan pendapatan, dan distribusi pendapatan.

Beberapa indikator yang mewakili kepemilikan atas harta yaitu pendapatan per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita. Indikator yang mewakili pertumbuhan pendapatan yaitu pertumbuhan ekonomi dan GDP/pertumbuhan penduduk. Indikator yang mewakili distribusi pendapatan yaitu: rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan manusia, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Rumus I-HDI berdasarkan kesejahteraan material (MWI) dan kesejahteraan non material (NMW) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut²⁷:

-

²⁶ *Ibid.*, hlm. 299.

I-HDI: 5/6 MI + 1/6 AI

MI = 2/6 FI + 1/6 (LI + SI + FSI + PI)

Keterangan:
MI = Main Index
FI = Faith Index
LI=Life Index

SI=Scinece Index

FSI =Family Social Index

PI =*Property Index*

6. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* asy-Syaṭibi

a. Definisi Maqāṣid Syarī'ah menurut para ulama

Secara lughawi, Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata yakni : Maqāṣid (مقاصد) dan Syarī'ah (اشريعة). Maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqs}had (مقصد) merupakan bentuk masdhar mimi. Dengan demikian Maqāṣid Syarī'ah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan Maqāṣid Syarī'ah yang hendak di capai dalam penetapan suatu hukum. Maqāṣid secara bahasa memiliki beberapa pengertian : pertama, pegangan: mendatangkan sesuatu, kedua: jalan yang lurus, ketiga: keadilan, keseimbangan, keempat: pecahan.² Definisi Maqāṣid Syarī'ah menurut ulama uṣūl ada beberapa macam diantaranya ialah:

1) Menurut imam al-Gazali

Maqāṣid Syan̄'ah penjagaan terhadap maksud dan tujuan Syarī'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.²⁹

2) Menurut Ibnu Asyūr

²⁷ MB Hendrie Anto: *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries.* hlm. 84.

²⁸Muhammad Sa'id Rhamadhan al-Buthi, *Maqāṣid Syarī'ah Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syarī'ah,* (Saudi Arabia: Dar Al-Hijrah,1998),hal.26-28.

²⁹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, (Jakarta: Kencana,2014),hlm.41.

Maqāṣid Syañ'ah adalah makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya bukan berdasarkan pada hukum tertentu.³⁰

3) Menurut asy-Syatibi

Al-*Maqāṣid* terbagi menjadi dua yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *Syarī'ah* dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Dianalisis melalui *Maqāṣid Syarī'ah* yang dapat dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.³¹

Di sisi lain sebagian ulama Muslim menganggap *al- maqāṣid* sama dengan *al-Masālih* (Maslahat-maslahat) seperti al-Juwayni ulama pertama yang memulai pembangunan teori al- *Maqāṣid*. Al-Juwayni menggunakan istilah *al-Maqāshid* dan *al-Masālih al-Āmmah* (maslahat-maslahat publik) sebagai sinonim.³²

Dari beberapa definisi ulama mengenai *Maqāṣid Syarī'ah* maka dapat disimpulkan bahwa inti dari *Maqāṣid Syarī'ah* adalah merupakan hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *falah*, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat. Tanpa memenuhi seluruh hal

³¹Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut As-Syathibi*, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 68.

³²Jasser 'Auda alih bahasa oleh 'Ali Abdoelmon'im, Al-Maqashid Untuk Pemula,

³⁰Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonom*i, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), cet pertama, hlm.2

³²Jasser 'Auda alih bahasa oleh 'Ali Abdoelmon'im, Al-Maqashid Untuk Pemula, (Yogyakarta : SUKA Press,2013), hlm. 6.

tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang lima pokok tersebut dijelaskan sesuai berdasarkan dengan urutanya yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu darūriyah, hājiyah, dan taḥsīniyah yang dapat digolongkan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhanya.

b. Biografi asy-Syatibi

Asy-Syatibi nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati asy- Syatibi, tanggal dan tahun lahirnya serta latar belakang keluarganya belum banyak diketahui, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah Jativa). Ia meninggal pada tahun 790 H. ³³

Beliau memiliki beberapa julukan antara lain; Al Imam *Al Allamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuan), *Al-Muhaqqiq* (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al Qudwah* (yang pantas diikuti), *Al Hafizh* (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits), dan *Mujtahid* (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).

Beliau adalah ulama yang benar-benar mengerti pokok-pokok ajaran, penafsir, ahli dalam bidang fikih, perawi hadits, ahli bahasa,

_

³³ Asfari Jaya Bakri, *Konsep...*, hlm. 21.

mahir dalam ilmu bayan, pendebat yang lihai dan handal, orang yang menjauhi hal-hal *syubhat*, memiliki keshalihan, ahli zuhud dan pengikut sunnah, imam yang muthlaq, pantas untuk diikuti, pembahas yang memiliki ketelitian yang istimewa, dan menguasai banyak disiplin ilmu. Asy-syatibi mendapat perhatian dikalangan pemikir pembaharuan dalam Islam karena sumbangan pemikirannya yang cukup besar di bidang pemikiran hukum Islam terutama melalui karyanya *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisam*.

Muhammad Abduh (w.1323 H/1905 M) seorang pemikir pembaharuan terkenal abad ke-19 melihat Asy-syatibi dengan *al-Muwafaqatnya* merupakan mata rantai yang sangat penting bagi pengembangan pemikiran hukum Islam. Menurut Fazlurahman Asy-syatibi adalah seorang ahli hukum yang cemerlang pada abad ke-8 H/14 M. Ia adalah seorang ulama yang berusaha menciptakan fondasi-fondasi rasional moral dan spritual sistem hukum islam. Asy-Syatibi adalah seorang ulama yang sejak kecil tekun belajar. Ia mendalami berbagai ilmu, baik dalam bentuk *'ulum al-wasa'il wa'ulum al maqashid* (metode maupun esensi dan hakikat). Asy-Syatibi adalah seorang yang tekun dan ulet dalam belajar, juga rendah hati, jauh dari sikap keangkuhan intelehtual dan berpegang teguh pada sumber utama ajaran agama.

Asy-Syaţibi memulai penimbaan ilmu dengan belajar dan mendalami bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab ini ia terima dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri (w. 754 H), Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad asy-Syaţibi (w. 760 H) dan Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari. Pengetahuan yang memadai tentang hadis ia terima dari Abu al-Qasim Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H). Ilmu Kalam dan falsafah diperolehnya dari Abu Ali Mansur al-Zawazi (w. 770 H) dan ilmu ushul fiqh diperolehnya dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Miqarri dan dari Imam ternama mazhab Maliki di Spanyol Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Syarif al-Tilimsani.

Karya-karya ilmiah asy-Syatibi dapat dikelompokkan kepada dua. Pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Termasuk dalam kelompok pertama adalah *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw, Khiyar al-Majalis, Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*. Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, al-I'tisam dan al-Ifadat wa al-Irsyadat*.

c. Maqāṣid Syarī 'ah dalam Pandangan asy- Syaṭibi

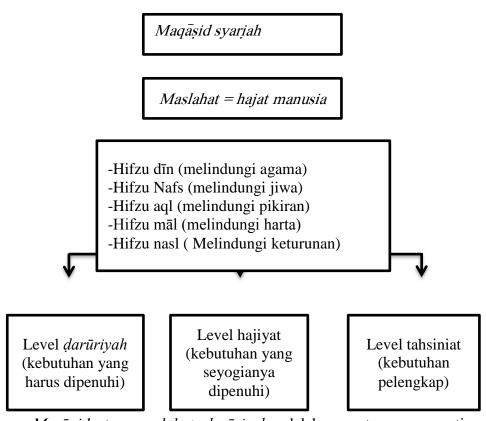
Menurut *Imam* asy-Syatibi Allah menurunkan syariah (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan

menghindari *kemudaratan (jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dalam bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *darūriyah* (primer), *ḥājiyah* (sekunder) dan *taḥsīniyah* (tersier).

Kelima hajat yang termasuk dalam *Maqāṣid Syan̄'ah* tersebut adalah sarana untuk menunaikan misi manusia yaitu menjadi hamba Allah swt atas dasar itu pula Asy-syatibi menyimpulkan :

"Masalahat adalah memenuhi tujuan Allah swt yang ingin dicapai pada setiap mahluknya. Tujuan tersebut ada 5(lima), yaitu melindungi agamanya,jiwanya,akalnya,keturunannya,dan hartanya. Standarnya setiap usaha yang merealisasikan lima maqāṣid tersebut, maka itu termasuk maslahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima Maqāṣid tersebut, maka termasuk muḍarat."

Untuk memperjelas substansi dan ragam di atas berikut penjelasannya pada gambar 2.1: ³⁴



Maqāṣid atau maslahat ḍarūriyah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainya, yang termasuk maslahat atau maqāṣid ḍarūriyah ini ada lima, yaitu: agama (ad-dien), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-māl) dan aql (al-'aql).

³⁴ Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonom*i, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2015), cet pertama,hlm.7.

Cara untuk menjaga yang lima tersebut dapat di tempuh dengan dua cara yaitu, *pertama*, dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaanya, dan *kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyyati al-ʻadam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaanya.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh: menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat, menjaga agama dari segi al-'adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad, menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum, menjaga jiwa dari segi al-'adam misalnya hukuman qishah dan diyat, menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu, menjaga akal dari segi al-'adam misalnya had bagi peminum khamr, menjaga keturunan dari segi al-wujud misalnya nikah, menjaga keturunan dari segi al-'adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif, menjaga harta dari segi al-wujud misalnya jual beli dan menjaga rizqi, dan menjaga harta dari segi al-'adam misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Pembebanan hukum syariat pada makhluk melekat dengan *maqāṣid*-nya. *Maqāṣid syarī 'ah* tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: *ḍarūriyah*, *ḥājiyah*, dan *taḥsīniyah*. Ketiganya itu harus diterapkan pada lima aspek *maqāṣid syarī 'ah*, hal ini seperti di bawah ini:

1) Memelihara Agama (*Hifdzu ad-Dien*)

Menjaga atau memelihara agama adalah menjaga agama (rukun iman dan rukun Islam), berdasarkan tingkatnya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a) Memelihara agama dalam peringkat darūriyah, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam tingkat primer, seperti adanya penutup aurat dalam melaksanakan shalat, adanya pendidikan tata cara sholat, jika hal ini tidak ada, maka akan mengancam eksistensi agama.
- b) Memelihara dalam peringkat hājiyah, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, misalnya adanya penutup aurat yang layak dalam melaksanakan ibadah shalat, seandainya tidak ada pakaian yang layak maka shalatnya akan tetap sah.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibanya kepada Allah SWT. Misalnya adanya tempat shalat yang bagus, sehingga membuat *mushalli* betah untuk beribadah lama dalam mushalla tersebut. Kegiatan ini erat kaitanya dengan etika yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak

akan mengancam eksistensi agama dan mempersulit orang yang bersangkutan.

2) Memelihara Jiwa (*Hifdzu an-Nafs*)

Memelihara jiwa di sini adalah menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas, berdasarkan tingkat kepentinganya juga dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dan obat-obatan untuk menghilangkan penyakit. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, atau apabila obat-obatan ini tidak ada maka juga sama.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *ḥājiyah*, seperti dibolehkan menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīniyah* seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifdzu al-'Aql*)

Memelihara akal yang dimaksud ialah memlihara supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non fisik, secara fisik maksudnya akal tidak dirusak dengan sesuatu yang merusak secara fisik, baik dirusak dengan narkoba atau yang lain, sedangkan secara non fisik maksudnya akal tidak di dipengaruhi oleh hal-hal negatif. Di lihat dari segi kepentingan menjaga akal, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) Memelihara akal dalam peringkat darūriyah adalah memelihara akal di tingkat dasar seperti diharamkan mengkonsumsi narkoba atau hal-hal yang menyebabkan pikiran hilang. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal/hilang pikiran.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyah* seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dibutuhkanya. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal seseorang tetapi hanya akan mempersulit diri orang tersebut dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi kalau pendidikan itu skala besar maka tingkatanya bukan *hājiyah* lagi melainkan *darūriyah*.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīniyah* erat kaitanya dengan etika dan jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi

akal secara langsung. Misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, pemberian beasiswa untuk studi di strata yang tinggi.

4) Memelihara Keturunan (*Hifdzu an-Nasl*)

Memelihara keturunan adalah memelihara keturunan untuk menjadi lebih baik dengan jumlah yang banyak. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhanya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍarūriyah* seperti anjuran untuk menikah. Jadi dapat dikatakan upaya untuk menjaga eksistensi keturunan adalah dengan menikah, dengan membantu kegiatan melahirkan agar bayi yang lahir dalam keadaan selamat dan yang lain.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyah* seperti memberikan suplement-suplement tambahan yang dibutuhkan bayi, supaya bayi menjadi tumbuh sehat.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīniyah* seperti menyediakan tempat yang kondusif, enak dan tenang bagi ibu yang mau melahirkan, sehingga para ibu senang untuk melahirkan dan merawat bayinya di sana.

5) Memelihara Harta (*Hifdzu al-Māl*)

Memelihara harta adalah memelihara harta supaya harta tersebut tidak rusak/masih tetap ada bahkan berkembang, di lihat dari segi kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) Memelihara harta dalam peringkat darūriyah seperti larangan mengambil harta orang lain yang bukan merupakan hak kita dengan cara yang tidak benar, di larang memberikan hartanya anak bodoh kepada anak bodoh sampai dia cerdas. Apabila kita melanggar dengan cara mengambil harta yang bukan menjadi hak kita atau memberikan hartanya anak bodoh kepada anak bodoh maka eksistensi harta akan terancam.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyah* adalah memenuhi kebutuhan tingkat kedua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti menginvestasikan hartanya atau mengajak orang bekerjasama dalam bisnis.
- c) Memelihara harta dalam peringkat taḥsīniyah erat kaitanya dengan etika bermuamalah atau berbisnis. Misalnya mengikuti pendidikan muamalah / berbisnis modern.
- a. Cara untuk memahami Maqāṣid Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi terdapat tiga cara yaitu³⁵:

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut* asy-Syaṭibi, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.hlm.92.

1) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan

Fokus cara ini adalah melakukan penelaahan pada lafal amr (perintah) dan lafal al-nahy (larangan) yang terdapat dalam al-Quran dan hadis secara jelas sebelum dikaitan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. artinya, kembali pada makna perintah dan larangan secara hakiki. Dalam konteks ini suatu perintah kata *asy-Syatibi* harus dipahami menghendaki siatu yang diperintahkan itu dapat diwijudkan atau dilakukan. Perwujudan isi dari perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh al-Syar'i (Tuhan). Demikian pula halnya dengan larangan, juga dapat dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang itu harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.

Pembatasan denga lafal perintah dan larangan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain adalah untuk menjaga dan membedakan dari perintah atau larangan yang mengandung tujuan yang lain. Penekanan asy-Syatibi dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas diatas merupakan sikap kehati-hatinya dalam upaya melakukan pemahamban *Maqāṣid Syanī 'ah* yang lebih tepat, sehingga *Maqāṣid Syanī 'ah* benar-benar dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam.

Disamping itu, apabila diamati lebih jauh, tampaknya cara analisis lafal oleh asy-Syatibi ditunjukkan terutama dalam rangka melakukan pemahamban terhadap ayat-ayat atau hadis yang berbentuk perintah dan larangan yang sebagian besar berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Analisis terhadap lafal perintah dalam larangan dalam ayat-ayat atau hadis ibadah secara jelas melahirkan tujuan primer, sedangkan tujuan sekunder tidak menjadi pertimbangan yang menentukan. Sebagai contoh pelaksanaan salat. Berkaitan dengan salat ini Allah berfirman dalam surat Taha ayat 14:

أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

"Dan laksanakanlah salat untuk mengingatKu". 36

Dalam surat al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman:

-وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"Dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar". 37

Ayat di atas mengandung suatu perintah untuk mendirikan salat dan secara jelas pula ayat itu menunjukkan manfaat atau hikmah yang diperoleh manusia setelah melakukan ibadah salat itu. tujuan daar dari pensyariatan salat itu adalah ibadah yang mengandung ketundukan kepada Allah secara ikhlas dan menyadari kehadiran diri di hadapan-

_

312.

 $^{^{36}}$ Al-Qur'an dan Terjemah, cet.1, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm.

³⁷ *Ibid.*,hlm. 401.

Nya. Sedangkan hikmah salat yakni terhindar dari perbuatan keji dan munkar merupakan tujuan sekunder.

2) Penelaahan *'illah al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan)

Pemahaman *Maqāṣid Syarī'ah* dapat pula dilakukan melalui analisis *'illah* hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran atau hadis. *'Illah* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis maka menurut asy-Syaṭibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat dicapai. Sebagai contoh *'illah* yang tertulis secara jelas, meurut asy-Syaṭibi dapat dilihat dalam pensyariatan nikah yang bertujuan antara lain melestarikan keturunan, pernsyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi dan pensyariatan hudud untuk memelihara jiwa.

3) Analisis terhadap *al-Sukut'an syar'iyyah al-'amal ma'aqiyam al-ma'na al-muqtadalah* (sikap diam al-Syar'i dari pensyariatan sesuatu).

Cara ketiga yang digunakan oleh asy-Syatibi dalam memahami Maqāṣid Syarī'ah dalam pengembbangan hukum Islam adalah melakukan pemahamban terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh al-Syar'i. Permasalahan hukum tersebut pada hakikatnya sangat berdampak posisitf dalam kehidupan.

Al-*sukut 'an syar'iyah al-'amal* dibagi oleh asy-Syatibi ke dalam dua macam. Pertama; al-sukut karena tidak ada motif atau faktor pendorong. Kedua; al-sukut walau ada motif atau faktor pendorong. Secara detail dapat diuraikan sebagai berikut³⁸:

a) Al-Sukut karena tidak ada motif

Al-Sukut atau sikap diam al-Syar'i dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong al-Syar'i untuk memberikan ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak positif. Sebagai contoh penerapan hukum Islam terdapat masalahmasalah yang muncul setelah wafat Nabi, seperti pengumpulan mushaf al-Quran, jaminan upah mengupah dalam pertukangan dan sebagainya.

Pada masa Nabi tidak ada dorongan untuk membuat mushaf al-Quran karena Nabi tidak pernah membayangkan lenyapnya catatan-catatan tentanf ayat-ayat al-Quran. Namun setelah Nabi wafat para sahabat memiliki kekhawatiran akan lenyapnya

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep* ...,hlm. 93.

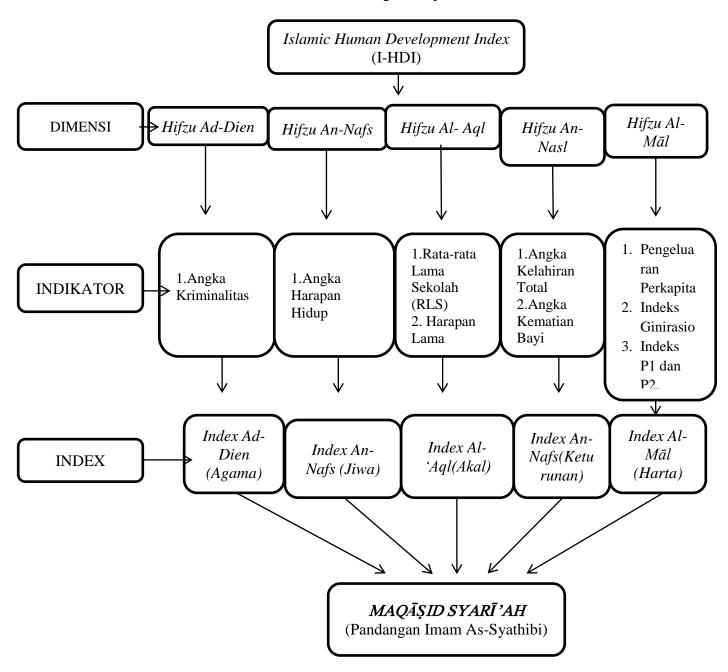
catatan-catatan al-Quran sehingga pada masa sahabat dibentuklah mushaf al-Quran agar terjaga keasliannya. Maka dari itu pembukuan al-Quran merupakan hal yang tidak dilarang bahkan sangat diperlukan apabila terdapat motif atau faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulan itu.

b) Al-Sukut karena ada motif

Maksud *al-sukut* walaupun ada motif ialah sikap diam al-Syari' terhadap suatu persoalan hukum, walaupun pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber :Diadaptasi Peneliti dari Jurnal M.B Hendri Anto, *Introducing an Islamic Human Development Index to Measure Development in OIC Countries*, 2009.

- Penjelasan mengenai kerangka berpikir
- 1. Dimensi-dimensi tersebut dibentuk berdasarkan teori dari *Maqāṣid Syarī'ah* mengenai 5 pokok kebutuhan dasar bagi manusia yang disebut dengan *addarūriyah al khamsah* (lima hal yang paling penting).
- 2. Indikator dibentuk melalui konsep *Maqāṣid Syarī'ah* asy-Syatibi yang telah spesifikkan kembali oleh MB. Hendri Anto dalam jurnalnya dengan pertimbangan ketersediaan data yang menggambarkan tercapainya indikator dari I-HDI.
- Menghitung index disesuaikan melalui perhitungan dan pengukuran yang mengacu pada konsep HDI.
- 4. Konsep I-HDI dibangun dari konsep gabungan pemikiran Asy-Syatibi, Al-Ghazali, Ibnu Asyur dan ulama lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu maupun kelompok, yang menggambarkan masalah sosial maupun masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian serta prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah dengan menganalisis angka HDI dan I-HDI baru kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif mencoba mereperentasikan data yang diperoleh agar bisa dimengerti oleh orang yang tidak secara langsung mengalaminya, sehingga dengan pendekatan ini diharapkan hasil temuannya dapat menjelaskan pemahaman tertentu. Jenis data yang dianalisis berupa data sekunder yang diambil dari publikasi Badan

¹Sugiyono, *Metode penelitan Kualitatif,* (Bandung: Alvabeta, 2017), hlm. 4.

Pusat Statistik Kota Yogyakarta. Cakupan spasial studi adalah Kota Yogyakarta, dengan data tahun 2015 sampai dengantahun 2016.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Yogyakarta. Sementara Objeknya adalah data HDI dan I-HDI Kota Yogyakarta yang meliputi data angka kriminalitas, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, daya beli, pendapatan perkapita, rasio gini dan kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai sumber data yang perannya sangat penting dalam memberikan informasi. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, sehingga narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.²

Sementara dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan manusia sebagai sumber informasi utama melainkan menggunakan sumber data sekunder yang terkait data HDI dan I-HDI sebagai sumber utama yang akan dianalisis. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam menganalisis HDI dan I-HDI adalah meliputi:

_

² H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), 57-58.

- a. Angka kriminalitas
- b. Angka Harapan Hidup
- c. Angka Partisipasi Sekolah
- d. Rata-rata Lama Sekolah
- e. Angka Kelahiran Total
- f. Angka Kematian Bayi
- g. Pengeluaran perkapita riil disesuaikan
- h. Gini Ratio

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumenter. Teknik dokumenter merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang di buat subyek sendiri atau oleh orang lain. Moleong mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam studi dokumentasi, yaitu³:

1. Dokumen pribadi

Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaanya. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinil dari kejadian situasi nyata.

³ Lexy J.Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 217.

2. Dokumen resmi

Menurut Moleong dokumen resmi terbagi menjadi dua bagian yaitu: Dokumen internal, berupa catatan, seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan dll. Dokumentasi eksternal yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga seperti, majalah, koran,bulletin,dll. Adapun bentuk dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni dokumen resmi eksternal, karena dokumen yang di ambil berupa data-data statistik sosial ekonomi kota Yogyakarta yang di ambil dari publikasi Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta.

E. Keabsahan Data

Untuk mendukung adanya netralitis empatik dalam upaya mengobjektifkan hasil temuan, seorang peneliti harus dapat menunjukkan bahwa datanya valid dan reliabel. Dalam penelitian kualitatif hal tersebut dapat diuji dengan triangulasi data dan sumber. Artinya peneliti harus melakukan klarifikasi tentang hasil temuannya pada orang ketiga, atau pada orang yang sama dalam waktu berbeda. Jika informasi yang diterima, baik oleh orang lain atau orang yang sama dalam waktu berbeda tetap menghasilkan informasi yang sama, data dinyatakan jenuh.

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulamengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Sedangkan triangulasi tekni yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Adapun dalam penelitian ini tiriangulasi yang digunakan peneliti untuk keabsahan data adalah triangulasi data yaang diambil dari berbagai sumber data yang dipublikasi secara resmi untuk kemudian di croschek kembali.

F. Tekhnik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisa data adalah metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif yang dimulai dengan memaparkan dan menjelaskan apa yang telah didapatkan dari referensi ataupun data. Proses analisis data ini yang dilakukan dengan cara memulai menelaah semua data yang terkumpul. Miles dan Huberman menawarkan model analisis data yang disebut sebagai model interaktif.

Model interaktif ini meliputi tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Ketiga hal tersebut merupakan kegiatan yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membang. Langkahlangkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut:

Data collection

Data display

Conclusions: drawing/ verifying

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif⁴

Sumber: Milles dan Huberman, 2014.

- Kondensasi Data (Reduksi Data),

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif.

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
diambil.

- Data Display (Penyajian Data),

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan Akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

_

⁴Milles, Matthew B, A.Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis : AMethods Sourcebook*, Edisi Ketiga (America : Sage Publications, Inc, 2014), hlm. 14.

- Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil analisis merupakan penarikan kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁵ Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil temuan yang diperoleh dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang setelah diteliti menjadi lebih jelas.⁶ Dalam penelitian kualitatif peneliti harus melaporkan semua temuan yang didapatkan secara transaparan meskipun temuan tersebut berlawanan dengan tema.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 99.

⁶Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 402.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Secara Geografis dan Kependudukan

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta secara fisiografis berupa dataran rendah. Akibat abu vulkanik letusan Gunung Merapi tingkat kesuburan tanah di Kota Yogyakarta cukup tinggi.

Letak Kota Yogyakarta yang berada di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Sebagian jenis tanahnya adalah regosol.¹

Secara adminstratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan terbagi atas 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut²:

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

: Kabupaten Bantul dan Sleman Sebelah timur

Kota Yogyakarta dalam Angka, 2015.
 Bappeda Kota Yogyakarta Profil 2017.

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Jumlah penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran,kematian dan migrasi/perpindahan penduduk. Perkembangan jumlah Penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi penduduk dapat dilihat dari perbandingan piramida penduduk dimana penduduk kota Yogaykarta didominasi oleh penduduk usia muda. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,67 persen laki-laki dan 51,33 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tiggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 94,81. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik sebanyak 417.744 jiwa dengan rincian sebanyak 203.845 jiwa penduduk laki-laki dan 213.899 jiwa penduduk perempuan dengan luas wilayah 32,50.³ Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 sebesar 12.854 jiwa per km². Kepadatan

_

³ Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017.

penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi.

Penduduk yang paling padat berada di kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.649 jiwa per km^2 ,dan paling jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 10.920 jiwa per km^2 . Dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut luas wilayah menurut kecamatan dan ketinggian Kota Yogyakarta.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Yogyakarta menurut Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Air Laut (hektar), 2016.

	Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
		< 100 m	100-199 m	> 200 m	Total
1.	Mantrijeron	261	0	0	261
2.	Kraton	140	0	0	140
3.	Mergangsan	202	29	0	231
4.	Umbulharjo	607	206	0	813
5.	Kotagede	302	5	0	307
6.	Gondokusuman	0	399	0	399
7.	Danurejan	0	110	0	110
8.	Pakualaman	0	63	0	63
9.	Gondomanan	42	70	0	112
10.	Ngampilan	31	51	0	82
11.	Wirobrajan	72	103	0	175
12.	Gedongtengen	0	96	0	96
13.	Jetis	0	170	0	170
14.	Tegalrejo	0	291	0	291
Jumlah		1657	1593	0	3250

Sumber: Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka 2017. (BPN Kota Yogyakarta "National Land of Yogyakarta Municipality").

2. Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2016 sebanyak 82,84 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 10,27 persen Katholik, 6,44 persen Kristen, 0,13 persen Hindu, 0,32 persen Budha dan 0,01 lainnya.

Sejalan dengan komposisi diatas, jumlah tempat ibadah yang tersebar di Kota Yogyakarta juga di dominasi oleh temapt ibadah umat Islam berupa masjid, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak 94,42 persen. Kemudian rumah ibadah Kristen dan Katholik masing-masing 4,02 persen dan 0,69 persen serta temapt ibadah umat Hindu dan Budha masing-masing 0,10 persen dan 0,59 persen.⁴

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, lebih-lebih apabila disertai ketrampilan dan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan diwilayahtersebut.

Tingkat partisipasi angkatan kerja sedikit mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 66,70 persen dari 70,07 persen pada 2014. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin maka tingkat TPAK perempuan 58,55 persen lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki yang mencapai

⁴ Profil Yogyakarta dalam Angka,2016.

75,50 persen. Tingkat pengaangguran pada tahun 2015 sedikit penurunan dari 6,35 persen pada 2014 menjadi 5,52 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin tingkat pengangguran laki-laki 5,11 persen lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran perempuan yang hanya 6,02 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha, sektor perdagangan besar, eceran, Rumah Makan, dan hotel mendominasi pasar kerja di Kota Yogyakarta dengan persentase 42,20 persen pada tahun 2015. Kemudian diiikuti sektoe jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 29,49 persen dan sektor industri pengolahan hanya 13,25 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2016 sebanyak 1.563 jiwa yang terdiri dari 693 lakilaki dan 870 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan SMU/Sederajat yaitu 44,08 persen, kemudian diikuti yang S1/Sederajat 36,02 persen, berpendidikan Diploma 12,73 persen dan sisanya 6,72 berpendidikan S2, SMP dan SD.

4. Kondisi Perekonomian

Kontribusi PDRB Kota Yogyakarta kedua setelah Sleman. Berbagai krisis global yang terjadi setelah periode 1997-1998 mempengaruhi perekonomian dunia. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008 berawal dari krisis keuangan Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan dengan krisis global yang terjadi pada tahun 2011 di kawasan Eropa. Hampir semua daerah mengalami dampak dari krisis ekonomi global tersebut tak terkecuali Kota Yogyakarta. Namun karena faktor

fundamental ekonomi Kota Yogyakarta cukup kuat imbas krisis tersebut tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta.

Keberadaan UMK yang mendominasi perekonomian di Kota Yogyakarta memiliki andil dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meskipun mengalami perlambatan ekonomi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tetapi masih mampu tumbuh diatas rata—rata pertumbuhan D.I Yogyakarta. Selama kurun waktu 2013–2016 laju pertumbuhan Kota Yogyakarta tertinggi kedua setelah Kabupaten Sleman.

Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, juga sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyandarkan perekonomiannya kepada sektor-sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, transportasi, telekomunikasi, keuangan, sewa, jasa perusahaan dan jasa-jasa. Hal ini terlihat dari struktur perekonomian Kota Yogyakarta selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Selama periode tahun 2012-2016, struktur perekonomian Kota Yogyakarta didominasi oleh 3 kategori ekonomi, yaitu: kategori industri pengolahan dengan rata-rata kontribusinya sebesar 13,87 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,80 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 11,18 persen. Sedangkan keempat belas kategori lainnya masing- masing menyumbang pembentukan perekonomian Kota Yogyakarta kurang dari sepuluh persen.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten / Kota di D.I.Yogyakarta (Persen) 2012 - 2016.

No	Kab /Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kulonprogo	4,37	4,87	4,57	4,62	4,76
2	Bantul	5,33	5,46	5,04	4,97	5,06
3	Gunungkidul	5,84	4,97	4,54	4,82	4,89
4	Sleman	5,79	5,89	5,3	5,28	5,27
5	Yogyakarta	5,40	5,47	5,28	5,09	5,11
D.I Yog	yakarta	5,37	5,47	5,17	5,95	4,05

Sumber; Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

Nilai PDRB Kota Yogyakarta tahun 2016 atas dasar harga berlaku mencapai 28,915 triliun rupiah. Kota Yogyakarta mampu menyumbang sekitar 26,26 persen terhadap kue ekonomi Provinsi D.I.Yogyakarta (110 triliun Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk.

Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-Faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta atas dasar berlaku sejak tahun 2012-2016 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 69,2 juta rupiah paling tinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

5. Kemiskinan

Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Septembe 2017 sebesar Rp 396.271 per kapita per bulan. Sementara garis kemiskinan pada September 2016 sebesar Rp 360.169,- per kapita per

bulan, atau garis kemiskinan mengalami kenaikan sekitar 10,02 persen. Bila dibandingkan kondisi Maret 2017 yang sebesar Rp 374.009 perkapita per bulan maka dalam kurun waktu satu semester terjadi kenaikan sebesar 5,95 persen.

Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2017, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 71,32 persen. Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, pada September 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 466,33 ribu orang. Bila dibandingkan dengan keadaan September 2016 yang jumlah penduduk miskinnya mencapai 488,83 ribu orang, maka selama satu tahun terjadi penurunan sebesar 22,5 ribu jiwa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P^1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P^2) pada periode Maret-September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

6. Kesehatan

Untuk meningkatkan kesehatan penduduk, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan disertai tenaga kesehatan

yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Upaya ini diarahkan agar tempat pelayanan kesehatan mudah dikunjungi dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2016 di Kota Yogyakarta terdapat 20 rumah sakit umum dan 18 puskesmas dan 9 puskesmas pembantu serta 127 apotek dan 27 toko obat. Kasus penyakit yang paling banyak diderita di Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas akut sebanyak 43.405 kasus.

Kemudian penyakit pilek sebanyak 31.090 kasus menempati urutan kedua. Untuk penyakit HIV/AIDS sebanyak 208 kasus naik dari tahun 2015 dan demam berdarah sebanyak 1.705 kasus naik dari tahun 2015. Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk,pemerintah mencanangakan program Keluarga Berencana (KB) dengan memberikan sarana pelayanan dan prasarana yang memadai.

7. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang semkain bermutu. Untuk itu, perlu didukung dnegan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

Secara Nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Di Kota Yogyakarta, pada tingkat pendidikan pra sekolah

dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah. Nilai angka partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) juga merupakan indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Di antara ke empat nilai APS pada tebel APS tahun 2016 anak usia 19-24 tahun yang paling kecil menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum menempuh pendidikan setingkat peruruan tinggi. Namun untuk usia 7-12 tahun mencapai 100 persen, ini berarti bahwa penduduk yang berusia tersebut seluruhnya menempuh sekolah.

8. Peradilan dan Kriminalitas

Tingkat kriminalitas dapat menggambarkan terjadinya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat., sekaligus merupakan fenomena sosial yang memerlukan penanganan serius. Pada tahun 2016 perkara pelanggaran yang masuk ke pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 10.881 perkara menurun dari tahun 2016 sebesar 50,02 persen. Seluruhnya perkara yang masuk mendapat putusan terima pidana, tidak ada stupun yang bebas, banding dan grasi. Jumlah perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menurun dari 368 pada tahun 2015 menjadi 363 pada tahun 2016. Penghuni rumah Tahanan menurun 6,87 persen menjadi 420 pada tahun 2016.

Dinas sosial Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencatat bahwa jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti asuhan sebanyak 404 anak. Jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 tercatat 1.930 orang. Pada tahun 2016 orang terlantar berjumlah 19 orang turun 44,12 persen dari tahun 2015 sedangkan jumlah anak jalanan naik 20 persen menjadi 48 anak.⁵

9. Pengeluaran penduduk dan Konsumsi Makanan

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran unutk mkebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Nilai pendapatan suatu rumah tangga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut dilihat dari sudut pandang ekonomi. Sejauh ini, dalam mengumpulkan data pendapatan, BPS melakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Hal ini disebabkan tingginya resiko bias jawaban responden jika ditanya pendapatannya. Data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS). Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat

_

⁵ Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017.

dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makananan terhadap tota pengeluaran makin membaik tingkat perekonomian penduduk.

Menurut Ernest Engel bila persentase makanan terhadap total pengeluaran lebih dari 80 persen maka tingkat kesejahteraan sangat rendah. Secara umum tahun 2016 tingkat kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta relatif lebih baik, dimana persentase non makanan terhadap total pengeluaran sebesar 63,99 persen. Presentase pengeluaran makanan terbesar terdapat pada kelompok, makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 18,75 persen, kemudian padi-padian sebesar 2,75 persen, dan kelompok tembakau dan sirih 2,69 persen.

Sementara itu, persentase terbesar pada pengeluaran non makanan adalah untuk kelompok perumahan bahan bakar, penerangan dan air yaitu sebesar 29,53 persen. Sedangkan untuk pengeluaran biaya pendidikan, aneka barang dan jasa serta barang tahan lama masingmasing adalah 8,62 persen, 8,04 persen dan 6,87 persen.

B. Pencapaian Pembangunan Manusia I-HDI di Kota Yogyakarta Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Pengukuran I-HDI meliputi : Angka kriminalitas, Angka Harapan Hidup, Angka Partisipasi Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Kelahiran Total, Angka Kematian Bayi, Pengeluaran perkapita riil disesuaikan, Indeks gini, Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks pembangunan manusia (HDI). Berikut hasil dan pembahasan masing-

masing indikator dalam bentuk indeks komponen I-HDI yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan indeks yang paling urgen menurut kebutuhan dasar manusia.

1) Hifzu māl

Harta menempati kedudukan paling mendasar dalam kebutuhan hidup manusia atau dalam *Maqāṣid Syarī'ah* disebut dengan kebutuhan darurriyah, merupakan kebutuhan utama (primer) yang jika ditinggalkan akan menyebabkan hilangnya keberlangsungan bagi kehidupan seseorang atau dapat menyulitkan hidup seseorang dengan ketiadaannya. Sehingga penjagaan terhadap harta menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan lain yang saling memiliki keterkaitan dan ketersambungan.

Dalam pengukuran indeks hifzu māl menggunakan dua indikator yaitu berupa indikator kepemilikan harta dan indikator distribusi pendapatan. Untuk indikator kepemilikan atas harta yang dapat dilihat melalui pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan indikator distribusi pendapatan digunakan data indeks rasio ginui dan indeks kedalaman kemiskinan,keparahan kemiskinan. Data mengenai pengeluaran perkapita dan rasio gini,dan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskina Penduduk Kota Yogyakarta tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut.

Tabel 4.3 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Golongan		2015		,	2016	
Dangaluaran	Makanan	/Non Mak	anan/Total	Makana	n	/Non
<99.999	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00
100.000-149.999	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00
150.000-199.999	41.07	58.93	100.00	0.00	0,00	0.00
200.000-399.999	60.10	39.90	100.00	58.58	41.42	100.00
400.000-499.999	58.89	41.11	100.00	54.29	45.71	100.00
500.000-749.999	53.07	46.93	100.00	48.61	51.39	100.00
750.000-999.999	46.78	53.22	100.00	50.79	49.21	100.00
> 1000.000	27.66	72.34	100.00	33.52	66.48	100.00
Total	33.27	66.73	100.00	36.00	64.00	100.00

Sumber; Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016, 2017.

Berdasarkan tabel 4.3 mengenai pengeluaran perkapita penduduk menggambarkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk terkecil ditahun 2015 dan 2016 dari jenis makanan adalah pada golongan pengeluaran 150.000-199.999 dengan persentase 41.07 dan 58.58 sementara dari jenis non makan dengan persentase 58.93 dan 41.42 Sedangkan pengeluaran rata-rata golongan terbesar berkisar > 1000.000 pada jenis pengeluaran makanan hanya berjumlah 27.66 dan 33.52 sementara non makanan mencapai angka 72.34 dan 66.48.

Sehingga total pada tahun 2015 dari pengeluaran makanan adalah sebesar 33.27 dan non makanan 66.73 dan total pengeluaran penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah sebesar 36.00 dan non makanan 64.00. Menurut Engle salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengukur pengeluaran rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada porsi

pengeluaran yang bergeser dari pengeluaran untuk makanan menjadi pengeluaran untuk yang bukan makanan.⁶

Tabel 4.4 Rasio Gini Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Uraian	2015	2016
Indeks	0,4431	0,4214
Kriteria	Moderat	Moderat

Sumber: Statistik Kota Yogyakarta, 2017.

Tabel 4.5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (dan Indeks Keparahan Kemiskinan (p^2) Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Indeks kedalaman kemiskinan (P1)				
2015	1.06			
2016	1.05			
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
2015	0.23			
2016	0.19			

Sumber; BPS Kemiskinan Kota Yogyakarta 2016

Pada tabel 4.4 Rasio gini Yogyakarta menunjukkan tahun 2015 sebesar 0,4431 dan tahun 2016 sebesar 0,4214. Secara kuantitatif ukuran tingkat ketimpangan ditribusi pendapatan dapat dilihat melalui gini rasio. Pada tahun 2016 gini rasio Kota Yogyakarta tercatat sebesar 0,4214, lebih rendah 0,0217 poin dibandingkan tahun 2015. Artinya ketimpangan ditahun 2016 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun 2016 lebih merata dibandingkan tahun 2015. Kota Yogyakarta tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 walaupun tidak terlalu signifikan. Secara kualitatif hal tersebut dapat terindikasikan

_

⁶ Statistik Daerah Kota Yogyakarta,2016, hlm. 27.

melalui kurva Lorenz tahun 2016 yang bergeser sedikit kearah garis diagonal dibandingkan dengan gambaran kurva Lorenz tahun 2015.

Suatu distribusi pendapatan dikatakan merata jika nilai koefisien gini mendekati angka nol (0) dan semakin tidak merata jika mendekati angka satu. Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti simpulkan secara sederhana bahwa sitribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta masih terbilang merata karena masih berada pada sekitar angka nol.

Nilai Maslaḥah yang ditampilkan dalam tabel gini rasio menunjukkan bahwa pendistribusian dikalangan penduduk Kota Yogyakarta sudah merata. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya *syarī'ah* yang kemudian didukung dengan firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya berikut :

"Agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu".⁷

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa setiap Allah menurunkan *syarī'ah* selalu memiliki tujuan yang erat dengan nilai Maslaḥah dan keadilan untuk hambanya. *Ḥifzu māl* yang dimaksud dalam ruang lingkup *maqāsid syarī''ah* dalam hal ini ialah menjaga diri dari kefaqiran menjadi kewajiban dasar bagi setiap manusia. Harta menjadi salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Firman Allah dalam QS: Al-Kahf: 46 berikut.

⁷Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 546.

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱلْبَقِيْتُ ٱلصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

> "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".⁸

Standar hidup layak penduduk Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa masing-masing indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian standar hidup layak mengalami dinamika angka. Dari tahun 2015 sampai tahun 2016 ada penurunan jumlah pengeluaran minimum dibawah standar hal ini menggambarkan bahwa menurut data tersebut kesejahteraan penduduk semakin membaik.

Kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya yang diperoleh dengan jalan yang benar maka hal tersebut merupakan bentuk dari telah terlaksananya penjagaan dalam segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yang merupakan bentuk melanggengkan keberadaanya dan mencegah dari (*min nahiyyati al- adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaanya.

Menjaga harta juga termasuk dalam aspek *ḍarūriyah* yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terkendalanya keberlangsungan hidup seseorang. Dari semua hal pokok *ad-ḍarūriyah al khamsah* (lima hal yang paling penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta maka, adapun memelihara harta menjadi hal *ḍarūriyah* jika menyebabkan seseorang hingga tidak bisa makan,sekolah, dan

_

⁸ *Ibid.*, hlm. 299.

mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya didapatkan pada saat sakit. Semua hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan jumlah harta yang dimiliki.

Berdasarkan tabel 4.5 yang menunjukkan angka kedalaman kemiskinan ditahun 2015 sebesar 1.06 dan tahun 2016 sebesar 1.05 sementara, keparahan kemiskinan tahun 2015 sebesar 0,23 dan tahun 2016 sebesar 0,19. Dalam periode tersebut dapat dilihat bahwa selalu bergeser angka menjadi lebih kecil. Artinya berkurangnya jumlah kedalaman kemiskinan dan keparahan tingkat kemiskinan ditahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengindikasikan bahwa kebutuhan *ḍarūriyah* tersebut dapat dicapai meskipun belum secara total menjadi nol dikalangan penduduk Kota Yogyakarta.

Dari segi kemaslahatan yang dicapai dengan melihat persentase angka daya beli masyarakat yang dilihat melalui pengeluaran penduduk jenis makanan dari tahun 2015-2016, selalu lebih besar dibandingkan nonmakanan juga menunjukkan bahwa dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang lebih bersifat *darūriyah* lebih didahulukan oleh penduduk dibandingkan pada pengeluaran yang sifatnya hanya *taḥsīniyah* nonmakanan maka hal ini sesuai dengan konsep masalahah pada Maqāṣid Syarī'ah. Dengan adanya nilai maslahah dalam hifzu maal menunjukkan bahwa penduduk Kota Yogyakarta mampu memperbaiki kehidupan mereka dibidang penjagaan harta sehingga indeks yang lain dapat berlangsung.

2) Hifz Dien

Jika dilihat perkabupaten/Kota rasio penduduk per polisi terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu 709, sedangkan beban pelayanan terkecil berada di Kota Yogyakarta dimana satu orang polisi melayani 243 penduduk. Perkembangan tingkat kejahatan ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,42 persen secara keseluruhan wilayah DI.Y.

Peningkatan ini disebabkan karena bertambahnya tindak kejahatan serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang terkena tindak kriminalitas untuk melaporkan tindaak kejahatan yang dialaminya. Berikut data kriminalitas Kota Yogyakarta yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Angka Kriminalitas Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Keterangan	2015	2016
Total Tindak Kriminalitas Keseluruhan Terlapor	2002	1592

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016.

Menurut Savitz Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan ialah angka total jumlah kejahatan, angka kejahatan per 100.000 penduduk dan selang waktu terjadinya tindak kejahatan. Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

_

⁹ Statistik Kriminal, 2017.

Total angka kriminalitas berdasarkan tabel 4.6 tersebut adalah data yang dihimpun oleh Polresta Kota Yogyakarta berdasarkan angka kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat. Kriminalitas tersebut mengarah pada keseluruhan tindak kejahatan selama periode tertentu. Beberapa contoh tindak kriminalitas yang paling mendominasi adalah pencurian, penipuan,dan penganiayaan serta diikuti oleh tindak kriminalitas lainnya seperti pengroyokan, penganiayaan ringan dan lain sebagainya.

Semakin besarnya resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan semakin tidak amannya suatu wilayah. Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data angka kriminalitas Kota Yogyakarta yang menunjukkan ada sejumlah 2002 kejahatan yang dilaporkan ditahun 2015, dan ditahun 2016 berkurang menjadi 1956 tindak kejahatan yang dilaporkan.

Esensi dari iman yang dibangun dalam konsep I-HDI adalah wujud dari *Maslaḥah* yang menjadi pondasi dalam konsep *Maqāṣid Syarī'ah* asy-Syaṭibi maupun ulama klasik. Elemen dalam *hifzu dien* tersebut yang mengarahkan dan menggiring pada penghindaran perbuatan yang bertolakbelakang dengan nilai-nilai *syarī'ah* salah satunya yaitu tindak kriminalitas. Dalam hal ini Allah juga telah menjelaskan bahwasannya sholat yang dilakukan seseorang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berikut firman Allah dalam Qs: Al-ankabut : 45.

"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar".(Qs:29:45).

Berdasarkan ayat tersebut menurut analisis peneliti ketika implikasi atau hikmah dari sholat seseorang tidak sesuai dengan perbuatannya, menunjukkan bahwa telah terjadi gap antara pelaksanaan hakikat ibadah dengan hikmah dari ibadahnya. Sehingga tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi disuatu wilayah salah satunya juga bisa dipengaruhi karena tidak adanya nilai sholat didalam diri seseorang sehingga ia tidak mendapatkan hakikat dari nilai sholat tersebut.

Sholat merupakan bentuk dari keimanan seseorang, jika dengan sholat saja tingkat kriminalitas masih tinggi maka orang-orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali lebih memiliki potensi untuk melakukan perbuatan keji dan munkar yang dalam hal ini disebut dengan tindakan kriminalitas.

Memelihara agama menempati urutan terpenting setelah memelihara harta karena tercukupinya standar hidup layak penduduk jika tidak diiringi dengan rasa aman hanya akan menyebabkan hilangnya ketenangan. Karena hal itulah al-Qur'an dan sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka beribadah.

Istilah ibadah diberi makna secara khusus di dalam fikih, yakni cara tertentu bersyukur kepada Allah dalam bentuk ritual yang tata

caranya sudah ditentukan sendiri oleh syari'at misalnya ibadah sholat. 10 Hifzu dien yang dimaksudkan oleh asy-Syatibi tidak terlepas dari pemeliharaan terhadap agama dalam bentuk rukun iman dan rukun Islam.

Salah satu yang digunakan dalam mengukur wujud pelaksanaan rukun Islam seseorang yang mengimani adanya Allah adalah sholatnya. Sholat menjadi syarat kedua setelah seseorang bersyahadat dan mengikrarkan diri untuk meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang ia pilih untuk diimaninya. Upaya dalam mengurangi tindakan kriminalitas di Kota Yogyakarta merupakan bentuk pemeliharaan agama dalam tingkatan primer atau yang biasa disebut dengan *darūriyah*. Pada tingkatan ini jika tidak terlaksana dengan baik akan mengancam eksisitensi penduduk disuatu wilayah tersebut khususnya penduduk Kota Yogyakarta.

Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi mengancam rasa aman bagi setiap penduduk juga lebih tinggi. Jumlah angka kriminalitas dapat menurun karena adanya upaya kerjasama antar kepolisian dan penduduk, Polisi sebagai orang yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti segala jenis kriminalitas dan penduduk sebagai orang yang ikut berpartisipasi meminimalisir kejahatan yang terjadi dengan melaporkan setiap tindak kriminalitas yang dilihat disekitarnya. Penurunan pada setiap tahunnya mengindikasikan bahwa pemeliharaan agama dalam tingkatan

¹⁰ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007)hlm. 96.

darūriyah sudah mendekati titik *Maslaḥah* sebagai tujuan dari *maqāṣid* syarī'ah itu sendiri.

Dalam hal ini berdasarkan data yang dipublikasikan Polresta Kota Yogyakarta antara tahun 2015-2016 terjadi penurunan angka kriminalitas cukup signifikan dari 2002 tindak kejahatan menjadi 1592 tindak kejahatan artinya terjadi penurunan angka cukup jauh yakni sebesar 410 tindak kriminalitas dalam jangka waktu satu tahun. Dengan begitu resiko penduduk mengalami tindak kriminalitas juga berkurang sesuai tujuan maqāṣid syarī'ah sendiri.

Sebagaiamana cara menjaga agama dapat ditempuh melalui segi adanya (min nahiyyati al-wujud) hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya contohnya menjaga rukun Islam yang lima dimana yang peneliti gunakan adalah pelaksanaan wujud dalam ritual sholat. Sedangkan dari segi ketiadaannya (min nahiyyati al-'adam) dengan mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya yakni berupa mengurangi kriminalitas itu sendiri dengan mengingatkan akan kerugian membuat mafsadat bagi orang banyak. Upaya mengurangi angka kriminalitas merupakan upaya melindungi agama dari mencegah darurat bagi setiap penduduk Kota Yogyakarta. Hal ini sebagaimana kaidah yang menyatakan:

"Menolak bahaya lebih diutamakan dari mengambil maslahah".

Rasa aman menjadi hal paling mendasar dibutuhkan bagi setiap orang sebelum ia memiliki hal mendasar lainnya yang menunjang

keberlangsungan kehidupannya. Menolak bahaya dalam hal ini bisa dengan menghukum setiap pelaku tindak kriminalitas sebagai upaya pencegahan maupun hukuman agar merasa jera untuk melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan orang lain.

Kriminalitas yang diangkat dalam pembahasan ini tidak memfokuskan pada satu jenis tindak kejahatan saja namun, membahas seluruh tindak kejahatan yang terlapor dan tercatat oleh Polresta Yogyakarta.

3) Hifzu Nafs

Ḥifzu Nafs yang diartikan sebagai pemeliharaan jiwa merupakan hal esensial berikutnya setelah pemeliharaan harta dan agama. Hal ini dikarenakan hanya orang yang berjiwa yang mungkin melakasanakan seluruh ketentuan agama. Syari'at hanya wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani maupun rohani. Sama halnya dengan memelihara agama maka memelihara jiwa juga terbagi dalam 3 tingkatan yang masing-masing diklasifikasikan berdasarkan tingkat daruriyat,hajiyat maupun tahsiniyat.

Dimensi jiwa (Ḥifzu nafs) yang digunakan untuk mengukur I-HDI adalah berupa data angka harapan hidup. Penggunaan indikator tersebut sudah cukup mewakili untuk mengukur dimensi Ḥifzu nafs. Adapun angka harapan hidup (AHH) di Kota Yogyakarta meningkat sebesar 5%, dengan angka 74,25 ditahun 2015 dan 74,30 ditahun 2016. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh UNDP dari angka harapan hidup maksimum

sebesar 85 dan angka minimum 25. Adapun standar tersebut menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kota Yogyakarta relatif tinggi.

Hal ini berhubungan dengan kesehatan di DI.Yogyakarta rata-rata relatif tinggi. Tahun 2014 angka harapan hidup Yogyakarta menjadi provinsi paling tinggi se-Indonesia hingga mencapai 74,2 tahun menurut kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas). Sementara itu pada tahun 2035 nanti diproyeksikan usia harapan hidup di Yogyakarta mencapai 75,5 tahun masih tertinggi dibanding provinsi yang lain. Berikut tabel mengenai angka Angka Harapan Hidup (AHH) menurut BPS adalah perkiraan banyak tahun yang dapat di tempuh oleh seseorang selama hidup sejak kelahirannya.

Tabel.4.7 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-

2016

Indikator	201	2016
Angka Harapan Hidup	74,2	74,30

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2017.

BerdasarkanTabel 4.6 dapat diketahui bahwa angka harapan hidup tahun 2015-2016 di Kota Yogyakarta meningkat sebesar 5%, dengan angka 74,25 ditahun 2015 dan 74,30 ditahun 2016 menunjukkan angka harapan hidup di Kota Yogyakarta terus meningkat.

Berangkat dari konsep Maqāṣid Syarī'ah pada indeks Ḥifzu nafs juga meliputi perlindungan secara fisik yang didalamnya juga termasuk pemenuhan kebutuhan pangan,angka harapan hidup, juga perlindungan kesehatan sebagai upaya pencegahan dari hal yang membahayakan kesehatan. Dengan tingkat kesehatan yang baik dari suatu penduduk maka menentukan angka harapan hidup penduduk tersebut. Ayat al-Qur'an yang menganjurkan perlunya menjaga kesehatan juga telah tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh: 168 berikut:

"Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu".(Qs:1:168).¹¹

Indikator yang digunakan untuk mengukur *Ḥifzu nafs* adalah dengan menggunakan data angka harapan hidup. Penggunaan indikator ini sudah cukup untuk mengukur *Ḥifzu nafs*, karena angka harapan hidup mencerminkan umur panjang dan sehat. Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu dengan situasi mortalitas yang berlaku pada lingkungan masyarakatnya tempat ia tinggal.

Menurut analisis peneliti wujud dari terlaksananya *Ḥifzu nafs* adalah berupa upaya menjaga kesehatan, maka penduduk Kota Yogyakarta sudah menunjukkannya dengan memiliki angka harapan hidup yang relatif tinggi pada setiap tahunnya yaitu mencapai 74,25 ditahun 2015 dan 74,30 ditahun 2016. Artinya penduduk Kota Yogyakarta dalam menjaga kesehatan yang dimulai dari makanannya,kesehatannya, dan

¹¹ Al-Qur'an dan *Terjemah*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014), hlm. 25.

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya yang menunjang kesehatan sudah mengutamakan hal-hal yang diiinginkan oleh *maqāṣid syarī'ah*. Memenuhi kebutuhan sandang dan pangan menjadi wajib dalam al ini demi menjaga jiwa seseorang melalui segi penjagaan al-wujud yakni dengan memakan makanan yang menunjang kesehatannya dibanding yang mengandung *mafasadat* yang berdampak pada keberlangsungan hidupannya. Perlindungan ini berkaitan dengan fisik maupun batin.

Dalam hal ini tingkatan memelihara jiwa yang lebih tepat digunakan berdasarkan tingkat kepentingannya maka menjaga keberlangsungan hidup termasuk peringkat pemeliharaan yang darūriyah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan pokok yang apabila ditinggalkan akan berakibat dengan terancamnya eksistensi jiwa manusia, sebagai bentuk mempertahankan hidupnya adalah dengan memenuhi kebutuhan sandang pangan dan kesehatannya.

4) Hifzu Aql

Untuk mengukur dimensi *Ḥifzu ʻaql* maka dibentuk indeks *aql* yang kemudian digunakan sebagai indikator untuk mengukur I-HDI dengan melihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah suatu penduduk. Rata-rata lama sekolah digunakan sebagai indikator dari *Ḥifzu ʻaql* dengan melihat jumlah tahun yang ditempuh penduduk usia 15 tahun keatas yang telah menyelesaikan pendidikan formal.

Dalam penafsiran kontemporer melindungi akal lebih diartikan kepada upaya-upaya menghindari diri dari taklid. Sehingga upaya mencari ilmu pengetahuan dan mengembangkannya merupakan salah satu upaya menjaga "aql sesuai yang diinginkan Maqāṣid Syarī'ah dalam menjaga aqal sebagai kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan data angka partisipasi sekolah penduduk Kota Yogyakarta tidak diragukan lagi karena penduduk yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun rata-rata telah menempuh pendidikan formal. Dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.8 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Uraian	2015	2016
7-12	100,00	100,00
13-15	100,00	100,00
16-18	92,16	86,17
19-24	69,35	65,38

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2016-2017.

Berdasarkan Tabel 4.8 angka partisipasi sekolah penduduk Kota Yogyakarta menunjukkan ditahun 2015 dan tahun 2016 mencapai 100 persen, ini berarti bahwa penduduk yang berusia tersebut seluruhnya sudah menempuh sekolah. Meskipun usia 19-24 tahun dengan persentase yang paling kecil karena masih banyak penduduk yang belum menempuh pendidikan setingkat perguruan tinggi.

Tabel 4.9 Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Uraian	2015	2016
EYS	16,32	16,81
MYS	11,41	11,42

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2016-2017.

Berdasarkan Tabel 4.9 harapan lama sekolah (EYS) ditahun 2015 16,32 dan tahun 2016 sebesar 16,81 sedangkan rata- rata lama sekolah (MYS) Kota Yogyakarta ditahun 2015 sebesar 11,41 dan tahun 2016 sebesar 11,42.

Berdasarkan pencapaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang diusulkan UNDP dengan batas minimal pendidikan pada indikator pendidikan Kota Yogyakarta. Didukung dengan data harapan lama sekolah (EYS) pada tahun 2015 mencapai angka 16,32% sementara rata-rata lama sekolah (MYS) tahun 2015 mencapai 11,41%. Selanjutnya ditahun 2016 EYS mencapai angka 16,81% sementara MYS mencapai angka 11,42%. Jika diamati jumlah EYS ditahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,51% meskipun MYS hanya bergeser satu angka dibandingkan tahun sebelumnya.

Pentinngnya memelihara 'aql dalam konsep maqashid syari"ah juga sama pentingnya dengan memelihara agama, keturunan, jiwa dan harta. Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak bisa memahami alam semesta,agama dan ajaran yang dibawanya. Sehingga sangat pentingnya

menuntut ilmu tersebut Allah memebrikan kemuliaan bagi penuntut ilmu pengetahuan dalam potongan *Q.s.* al-Mujadallah ayat 11 berikut:

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". ¹² (Qs.58.11).

Kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tidak diberikan kepada orang lain selain orang yang beriman. Dalam konsep Maq \bar{a} sid Syar \bar{i} 'ah yang sangat erat kaitannya dengan Maslahah adalah karena Allah memilikii tujuan dalam setiap perbuatanNya.

Asy-Syaṭibi juga mengakui peranan 'aql yang besar dalam memahami dalil-dalil syarī 'ah. Karena 'aql itulah yang membedakan antara eksistensi manusia dan binatang bahkan juga membedakan eksistensinya dengan malaikat.

Dengan 'aql tersebut Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, mengatasi martabat segala mahluk. Bahkan sering dijumpai di dalam al-Qur"an kalimat seperti laallakum ta"qilun (agar kamu berakal), laallakum tatafakkarun(agar kamu berfikir, dan la'allakum ta'lamun (agar kamu mengetahui). Semua ungkapan tersebut mendorong manusia untuk menggunakan 'aql nya. 12

Menuurut peneliti memelihara *aql* dalam hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan formal jika dilihat melalui *maqāṣid syarī'ah* merupakan kebutuhan *ḥājiyah*. Artinya anjuran menuntut ilmu

¹² Zaini Dahlan, " *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta : UII Pess Yogyakarta, 2014).hlm. 543.

pengetahuan itu hukumnya wajib tetapi tidak hanya sekedar melihat pada tingkat pendidikan seseorang melalui sekolah formal yang mampu ditempuh. Ada orang yang dengan pendidikan formalnya hanya mampu tamat SD, SMP, atau SMA, tetapi ia memiliki wawasan lebih luas yang didapatkannya diluar sekolah formal.

Maka pendidikan yang dimaksudkan bukan saja hanya sekedar seberapa lama sekolah formal dapat ditempuh, tetapi ada pendidikan lain diluar sekolah yang menjadi kewajiban bagi setiap orang. Dalam HDI terdapat batasan minimum dan maksimum usia seseorang menempuh pendidikan dan seharusnya pendidikan sudah berakhir. Namun dalam konsep I-HDI yang erat dengan nilai maqāṣid syarī'ah tidak ada batasan usia untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan baru, selama seseorang tersebut masih hidup maka tetap wajib baginya. Pendidikan inilah yang disebut dengan pendidikan seumur hidup. Sesuai dengan istilah mahfuzat yang mengungkapkan tuntutlah ilmu dari buaiyan sampai ke liang lahat.

5) Hifzu nasl

Hifzu nasl merupakan upaya memelihara,melindungi keturunan juga menjadi hal yang esensial dalam pembahasan maqāṣid syarī'ah. Untuk menjaga keberlangsungan hidup tersebut manusia diperlukan menjaga keturunan dan keluarganya. Sehingga untuk mengukur indeks Hifzu nasl dibentuk sebuah angka index nasl dengan menggunakan indkator yang dapat mencerminkan dimensi nasl tersebut. Adapun data

yang dapat digunakan untuk mengukur *Ḥifzu nasl* tersebut adalah data angka kelahiran total dan jumlah kematian bayi.

Tabel 4.10 Angka Kelahiran Total Penduduk Kota Yogyakarta Tahun

2015-2016	

Indikator	2015	2016
Lahir Hidup	3.972	3.841
Lahir Mati	33	21
Total Hidup + Mati	4.005	3.862

Sumber ; Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Tabel 4.11 Angka Kematian Bayi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun

2015-2016

Indikator	2015	2016
Bayi Laki-laki	21	15
Bayi Perempuan	12	15
Total	33	30
Total dalam Persentase	8,31	8,0

Sumber ; Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016.

Angka kelahiran total penduduk lahir hidup dan lahir mati Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar 4.005 dan tahun 2016 sebesar 3.862. Menurut Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta angka kelahiran hidup ditahun 2015 dari total 4005 terbagi atas bayi lahir hidup sebanyak 3.972 dan lahir mati sebanyak 33 bayi. Sedangkan ditahun 2016 jumlah total lahir hidup menurun menjadi 3.841 sementara lahir mati sebanyak 21 orang artinya terdapat penurunan angka kematian sebanyak 12 orang bayi.

Sementara angka kematian bayi (AKB) tahun 2015 berjumlaha 33 bayi dan tahun 2016 berjumlah 30 bayi. Jumlah tersebut secara total yang

terlapor pada data dari kesehatan kesehatan keluarga dan gizi dinas kesehatan Kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang mendukung tingkat kelahiran hidup dan kematian bayi bisa saja dipengaruhi oleh faktor gizi yang dikonsumsi oleh Ibu hamil selama masa mengandung.

Dalam implementasi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta juga mencantumkan salah satu tujuannya meningkatkan kualitas kesehatan penduduk sehingga harapan hidup masyarakat pun dapat meningkat. Tujuan tersebut jika dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah* memiliki korelasi yang sama-sama ingin mencapai kesejahteraan yang memiliki nilai *Maslaḥah* bagi penduduk.

Menurut BPS angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi dapat diartikan sebagai kematian yang terjadi antara setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun.

Memelihara keturunan dalam peringkat darūriyah dalam hal ini adalah seperti anjuran untuk menikah. Secara internal menikah merupakan upaya untuk menjaga eksistensi keturunan agar terjadi keberlanjutan generasi. Secara eksternal darūriyah dalam memelihara keturunan ialah pemerintah memperhatikan fasilitas kesehatan berupa,rumah sakit dan tenaga medis yang memadai.

Ditempat lain banyak terjadi kematian bayi karena tidak memadainya fasilitas kesehatan bagi Ibu melahirkan, hal ini banyak terjadi di desa-desa terpencil.Sehingga pentingnya menyediakan fasilitas kesehatan bagi Ibu hamil dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* menjadi keharusan yang apabila ditiadakan akan menimbulkan *mafsadat* bagi keselamatan bayi maupun Ibunya pada saat persalinan. Adanya anjuran untuk menikah ini juga berdasarkan pada firman Allah dalam Qs.An-Nisa: 1 berikut:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Qs.04:01).

Tujuan menikah tersirat dalam ayat tersebut agar dari pernikahan yang dilakukan dapat menjaga keturunan yang banyak, dalam arti tetap Memelihara keturunann dalam Maqāṣid Syarī'ah dimulai sejak memilih makanan yang dikonsumsi karena akan mengalir keseluruh tubuh dan bercampur dengan darah. Jika harta yang digunakan untuk memelihara keturunan didapat dari harta yang haram baik zatnya maupun cara

¹³ *Ibid., Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 77.

mendapatkannya maka darah yang mengalir keseluruh tubuhpun akan ikut haram hingga pada keturunannya.

C. Perbandingan Pencapaian antara HDI dan I-HDI di Kota Yogyakarta Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Berdasarkan pengukuran HDI dan I-HDI yang menggunakan konsep dasar berbeda maka dapat adapun perbandingannya sebagai berikut.

a. Sebaran nilai I-HDI lebih bervariatif dibandingkan nilai HDI.

Sebaran nilai yang ditampilkan I-HDI lebih bervariatif dibandingkan HDI. Hal ini menjadikan I-HDI mampu menjangkau cakupan yang lebih luas dalam mengamati penduduk secara lebih komprehensif. Nilai I-HDI lebih mencerminkan kondisi obyek yang sebenarnya dari pada nilai HDI. Dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.12 Komponen Pencapaian HDI Kota Yogyakarta
Tahun 2015-2016

Indikator	2015	2016
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	74,25	74,30
Harapan Lama Sekolah	16,32	16,81
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,41	11,42
Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita disesuaikan (ribu rupiah)	17.316,78	17.770,00
HDI	84,56	85,32

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2016

Tabel 4.13 Komponen I-HDI Berdasarkan Ukuran Materi (*Material Welfare Index*) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Indikator	Kategori	2015	2016
Pengeluaran Perkapita (Daya	Makanan	33.27	36,00
Beli)	Non Makanan	66,73	64,00
Gini rasio (Index Gini)		0,4431	0,4214
Kedalaman Kemiskinan (P1)		1.06	1.05
Dan Keparahan I (P2)	Kemiskinan	0.23	0.19

Sumber :Kota Yogyakarta dalam Angka 2016-2017, Statistik Kota Yogyakarta,2017, BPS Kemiskinan Kota 2016.

Tabel 4.14 Komponen I-HDI Berdasarkan Ukuran Non Materi (Non Material Welfare Index) Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016

Indikator	2015	2016
Angka Kriminalitas	2.002	1.592
Angka Harapan Hidup	74,25	74,30
Harapan Lama Sekolah	16,32	16,81
Rata-rata Lama Sekolah	11,41	11,42
Angka Kelahiran Total (Lahir Hidup+Mati)	4.005	3.862

Sumber; Polresta Kota Yogyakarta, Bps Kota Yogyakarta, Yogyakarta dalam Angka, dan Dinas Kesehatan kota yogyakarta.

Dapat diketahui bahwa sebaran nilai HDI penduduk Kota Yogyakarta berskisar sebesar 84,56 ditahun 2015 dan 85,35 ditahun 2016. Berbeda dengan nilai I-HDI yang lebih bervariatif sehingga sebaran nilai I-HDI penduduk Kota Yogyakarta hanya dapat dilihat berdasarkan masing-masing indeks komponen yang dibagi menjadi dua indikator kesejahteraan yakni indeks kesejahteraan materi (MWI) dan kesejahteraan non materi (NMI).

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat perbandingan angka antara HDI dan I-HDI pada penduduk Kota Yogyakarta. Angka HDI menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori tinggi. Sementara angka I-HDI menunjukkan bahwa pembangunan manusia secara islami yang diklasifikasikan menjadi dua bagian materi dan non materi cukup bervariatif untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada tahun 2015-2016 di Kota Yogyakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan status HDI tinggi pada suatu wilayah tidak dapat mencerminkan bahwa status I-HDI juga tinggi. Berdasarkan pada temuan tersebut maka nilai I-HDI lebih mencerminkan kondisi obyek yang sebenarnya dari pada nilai HDI.

b. Perbedaan standar status pembangunan antara HDI dan I-HDI

Terdapat perbedaan dalam menentukan status pembangunan antara HDI dan I-HDI. Nilai HDI dapat diukur secara langsung berdasarkan standar peringkat yang telah ditetapkan oleh UNDP sedangkan, I-HDI belum ada standar baku yang menetapkan untuk menentukan peringkat I-HDI dalam mengukur status pembangunan secara islami dalam suatu wilayah.

Hanya saja dalam pengukuran I-HDI status tersebut diwujudkan dalam rupa tercapainya kesejahteraan masyarakat serta berkurangnya ketimpangan menjadi salah satu indikator dari sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam ajaran Islam sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan yang sasarannya adalah manusia.

Dari standar perhitungan yang berbeda tentu menghasilkan hasil pencapaian berbeda antar HDI dan IHDI namun meskipun begitu keduanya sama-sama berorientasi pada pembangunan yang berbasis pada manusia dengan masing-masing indikator yang dianggap mampu mewakili dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia.

HDI adalah ide yang dicanangkan oleh lembaga internasional UNDP sehingga segala yang berkaitan dengan pembangunan manusia diatur berdasarkan standar yang disepakati oleh negara-negara terkait. Sementara I-HDI adalah konsep baru yang konsep dasarnya tetap berawal dari HDI kemudian dikembangkan dengan konsep *maqāṣid syarṭah*. Pencapaian angka HDI dan I-HDI menjadi barometer seberapa kuat kualitas *syarṭah* dalam agenda pembangunan ekonomi berbasis *maqāṣid syarṭah* yang erat kaitannya dengan nilai kemaslahatan dan keadilan.

Sebagai mukalaf, manusia dituntut untuk melakukan segala jenis perbuatan yang mengandung nilai kemaslahatan. Mereka diciptakan untuk beribadah dan berfungsi sebagai kholifah Allah dalam menegakkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuan mereka.

Kekuatan jasmani merupakan faktor terpenting bagi bagi terlaksananya perbuatan, yang karenanya daya jasmani menjadi syarat bagi terlaksananya hukum syariat. Atas dasar ini, Al-Syathibi menolak adanya hukum taklif yang tak terkjangkau oleh daya jasmani. Maka, syariat tidak menuntut untuk menghilangkan tabiat, misalnya nafsu makan dan seksual, karena hal itu diluar daya manusia. 14

Secara sederhana Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan hanya sekedar di ukur melalui tingkat pendidikan,kesehatan dan pendapatan saja karena pada kenyataannya ada indikator lain yang tidak tersentuh oleh ketiga indikator yang digunakan HDI tersebut dalam mengukur sebuah pembangunan manusia. Maka kemudian dibentuklah sebuah konsep yang diharapkan lebih komperhensif lagi dalam mengukur kesejahteraan manusia melalui indikator-indikator yang lebih menekankan pada nilai syariat yang kental dengan ajaran maslahat.

Dengan tercukupinya tiga hal dalam HDI (kesehatan,pendidikan dan pendapatan) belum menjamin bahwa penduduk merasa aman dengan perolehan ketiganya tersebut. Maka disinilah I-HDI dikembangkan dan berperan sebagai penyempurna dari pengukuran HDI dengan menambahkan beberapa indikator tambahan yang dianggap mampu menyentuh aspek lebih komperhensif.

Berdasarkan paparan analisis diatas maka, peneliti menggunakan maqāsid syarī'ah as-Syatibi sebagai acuan dalam menganalisis hasil

_

¹⁴Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta : Penerbit Erlangga,2007)hlm.180.

penelitian. Dalam menganalisis HDI dan IHDI, peneliti menggunakan lima komponen penjagaan dalam *maqāsid syari'ah* yakni, penjagaan terhadap agama (*Hifzul al-Dīn*), penjagaan terhadap diri (*Hifzul Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifzul 'Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifzul Nasl*), dan penjagaan terhadap harta (*hifzul māl*) berdasarkan tingkatan maqasid *ḍarūriyah*, *ḥājiyah*, dan *taḥsīniyah*.

Perbandingan hasil antara HDI dan I-HDI menjadi suatu standar konsep yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. HDI dengan konsep dasarnya yang mengutamakan indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak merasa konsep tersebut sudah dapat mewakili kebutuhan dasar bagi manusia.

Sementara I-HDI juga tidak terlepas seutuhnya dari ketiga kebutuhan dasar yang dicanangkan HDI tersebut, hanya saja kemudian I-HDI menambah indikator lain yang khas dengan nilai-nilai islami yang menunjukkan adanya peran syari'at dalam mengatur kebutuhan dasar yang dikenal dengan *maqāṣid syarṭah*. Sehingga sebaran nilai yang dihasilkan oleh I-HDI pun lebih bervariatif dibandingkan HDI. Dari hal tersebut maka kemudian menjadikan standar pengukuran yang digunakan pun menjadi berbeda dan tidak bisa disamakan dalam mengukur status pembangunan suatu wilayah antar standar yang digunakan HDI dan standar yang digunakan oleh I-HDI.

Nilai-nilai *maqāṣid syarṭah* sebenarnya juga tercermin pada konsep HDI yang didalamnya mengangkat topik tiga komponen dasar kebutuhan manusia yakni,kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. sementara I-HDI mengusulkan beberapa indikator tambahan dengan melihat angka kriminalitas, angka kelahiran total,angka kematian bayi, pengeluaran perkapita disesuaikan,indeks gini dan mengukur kemiskinan. Berikut perbandingan pencapaian HDI dan I-HDI menurut perspektif *maqāsid syariah*:

1) Hifzu dien

Kewajiban menjaga agama sama dengan memelihara agama dengan cara melanggengkan keberadaannya serta mencegah dari hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Hal tersebut menjadi indikator yang diangkat oleh I-HDI tetapi tidak dalam konsep HDI, indikator ini tidak digunakan sebagai dasar dalam mengukur pencapaian pembangunan manusia. Menjaga agama dalam hal ini dengan melihat jumlah angka kriminalitas, semakin tinggi tingkat kriminalitas maka menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* belum diterapkan dengan baik dalam suatu wilayah.

Indikator dari kesejahteraan di ukur melalui aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila perpecahan dan konflik yang merusak antar kelompok dan golongan dalam masyarakat dapat dicegah dan diminimalisir. Masyarakat yang sejahtera terbebas dari rasa takut dan tidak aman dari lingkungan sosial mereka.

Tercatat menurut data polresta Kota Yogyakarta ditahun 2015 tindak kriminalitas terlapor mencapai 2002 dan menurun ditahun 2016 menjadi 1592. Dengan menurunnya angka tersebut maka penerapan hifzu dien Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dituju oleh maqāṣid syarṭah dalam memelihara agama dilingkungan penduduk sekitar dalam bentuk keamanan yang meningkat yang diterima oleh penduduk Kota Yogyakarta.

2) Hifzu nafs

Kewajiban memelihara jiwa dalam *maqāṣid syarjah* diartikan dengan menjaga fisik agar tetap sehat dan tetap bisa beraktifitas. Untuk tetap sehat dalam memelihara jiwa yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makan untuk mempertahankan hidupnya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksisitensi kehidupan secara otomatis merupakan kebutuhan dan sebaliknya sesuatu yang mengancam kehidupan yang menimbulkan kematian ataupun merusak kehidupan pada dasarnya harus dijauhi.

Sehingga pentingnya menjaga jiwa diukur oleh I-HDI dengan meningkatnya angka harapan hidup, semakin tinggi angka tersebut maka indikator yang mencerminkan dari indeks *hifzu nafs* telah sejalan dengan harapan yang didinginkan oleh *maqāṣid syarṣah.* Dalam pengukuran HDI angka harapan hidup penduduk digunakan dalam mengukur tingkat kesehatan penduduk.

3) Hifzu 'aql

Al-Syathibi mengemukakan bahwa penjagaan terhadap akal merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Penjagaan akal terkait dengan perlindungan akal dari sesuatu yang dapat merusakanya secara fisik maupun non fisik. Indikator yang digunakan dalam konsep I-HDI dalam mengukur indeks *hifzu 'aql* adalah dengan melihat angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sebagai indikator pendukung maka peneliti tambahkan angka partisipasi sekolah untuk melihat usia berapa penduduk mulai memperkenalkan dunia pendidikan formal kepada anak-anaknya.

Antara HDI dan IHDI memakai data tersebut untuk melihat tingkat pendidikan dan lamanya sekolah suatu penduduk, maka dalam maqāṣid syarṭah memelihara akal dalam hal pendidikan dikategorikan dalam tingkat dauriyyah yang apabila tidak dilakukan akan mempersulit penduduk dalam menjalani kehidupan di lingkungannya. Islam juga sangat memuliakan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dari orang yang tidak berilmu.

4) Hifzu nasl

Kewajiban menjaga atau memelihara keturunan berarti menjaga keluarga dari keselamatan di dunia dan akhirat karena inilah tujuan dari penerapan *maqāṣid syarjah.* Jika HDI hanya

terfokus pada pencapaian kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokok berupa kemampuan memenuhi sandang pangan maka dapat disebut pembangunan manusia sudah tercapai. Sementara I-HDI lebih kepada pencapaian dua nilai pokok yang kental dengan pencapaian dunia juga akhirat.

Menjaga keselamatan di dunia bisa berupa sebuah upaya seorang kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berkaitan sandang pangan keluarganya. Jika hal dasar tersebut terpenuhi maka memelihara keturunan dan keselamatan di dunia yang dimaksudkan oleh *maqāṣid syarṭah* sudah terpenuhi. Sementara menjaga keselamatan di akhirat berupa kewajiban seorang kepala rumah tangga adalah mencari rezekhi yang halal sesuai tuntutan syari'at. Asal muasal inilah yang menjadi dasar penting dalam konsep *maqāṣid syarṭah*. Maka dalam hal ini memelihara keselamatan keluarga dilihat melalui angka kelahiran total dan kematian bayi.

HDI menggunakan angka harapan hidup dan menambahkan kriteria dalam melihat tingkat kesehatan dengan melihat angka kematian ibu dan bayi serta bayi lahir hidup. Maka dengan tercapainya angka-angka tersebut sesuai standar yang ditetapkan UNDP maka menurut konsep HDI sudah tercapai. Sementara I-HDI tidak hanya melihat angka sebagai indikasi dari

tercapainya pembangunan manusia tetapi kental dengan nilai *maqāṣid* yang orientasinya selain dunia juga akhirat.

Dengan melihat angka kelahiran total dan kematian bayi diharapkan ada upaya pemerintah khususnya dinas kesehatan dalam menanggulangi kematian bayi khususnya penyebab utama kematian bayi disebabkan oleh keadaan ekonomi masyarakat yang rendah. Sehingga berdampak pada kesehatan seorang ibu pada saat hamil kurang mendapatkan asupan nutrisi untuk bayinya tersebut. Dalam islam memperbanyak keturunan menjadi hal yang snagat dianjurkan maka nilai *maqāṣid syarṭah* yang ingin diangkat adalah dengan banyaknya keturunan yang soleh akan membangun perdaban manusia yang lebih baik dalam segala lini pembangunan.

5) Hifzu Maal

Memelihara harta dalam Islam juga menjadi salah satu kewajiban karena harta merupaka kebutuhan dasar bagi setiap orang, hampir semua ibadah memerlukan harta misalnya zakat,infak,sedekah,haji,menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dalam konsep I-HDI indeks hifzu maal merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Secara umum indikator yang mewakili kepemilikan atas harta yaitu pendapatan perkapita dan rata-rata pengeluaran perkapita. Sedangkan untuk melihat distribusi pendapatan yaitu rasio gini,indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.

Antara HDI dan I-HDI meskipun berbeda dalam menggunakan dimensi pencapaian atas kepemilikan harta atau standar hidup layak,namun keduanya sama-sama mengarah pada kesejahteraan penduduk.

Perbandingan pencapaian HDI dan I-HDI bukan merupakan sesuatu yang bertolak belakang dalam nilai-nilai kemanusiaan. Antara HDI dan I-HDI membangun konsep yang cukup komperhensif dalam mengukur sesuai kebutuhan masing-masing. Maka dalam persepektif *maqāṣid syarī'ah* selama hal tersebut tidak menimbulkan mudorot maupun mafsadah bagi kehidupan sendiri maupun orang banyak termasuk dalam maslaḥah.

Tabel 4.15 Perbandingan pengukuran HDI dan I-HDI.

N.T.	II ID 1 IDI	II 'ID 1 LIIDI
No	Hasil Pengukuran HDI	Hasil Pengukuran I-HDI
1.	Indeks pada HDI yang	Sementara I-HDI mengukur indeks komponen
	meliputi 3 dimensi :	lebih bervariatif yang meliputi :
	a. Kesehatan berupa	a. hifzu ad-dien berupa angka kriminalitas yang
	angka harapan hidup.	meliputi semua tindak kejahatan secara
	b. Pendidikan berupa	menyeluruh dalam periode tertentu.
	harapan lama sekolah	b. hifzu an-nafs berupa angka harapan hidup
	dan rata-rata lama	penduduk.
	sekolah.	c. <i>hifzu 'aql</i> berupa angka partisipasi sekolah,
	c. Standar Hidup Layak	angka harapan lama sekolah,dan angka rata-
	berupa jumlah	rata lama sekolah.
	pengeluaran perkapita	d. hifzu an-nasl berupa angka kelahiran total
	penduduk.	dan kematian Bayi.
	1	e. dan <i>hifzu al-maal</i> berupa angka indeks gini
		dan kedalaman serta keparahan kemiskinan.
2.	Hasil HDI dapat	Hasil I-HDI memang mencerminkan
	digunakan untuk	pembangunan manusia menurut Islam secara
	mengukur standar status	lebih luas akantetapi, hanya dapat digunakan
	pembangunan suatu	untuk mengukur sebuah pembangunan
	wilayah sudah	berdasarkan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> dan tidak ada
	tinggi,sedang ataupun	standar pengukuran status seperti HDI yang bisa
	masih rendah.	digunakan sebagai standar apakah wilayah
	·	tersebut masuk kategori status tertentu. I-HDI
		hanya dapat mengukur secara lebih substansif
		pada pencapaian masing-masing indeks dan tidak
		bisa menggunakan rumus yang sama dengan
		Taran and James Ja

No	Hasil Pengukuran HDI	Hasil Pengukuran I-HDI	
		yang digunakan HDI.	
3.	HDI dibentuk oleh UNDP secara resmi dan diakui untuk mengukur standar pengukuran negara pada tingkat Internasional.	Sementara I-HDI hanya digunakan sebagai tolak ukur seberapa jauh nilai-nilai syari'ah yang identik dengan kemaslahatn dan keadilan melekat pada masing-masing setiap indeks yang diusulkan I-HDI yang dibentuk melalui konsep <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .	
4.	Perbedaan terakhir ialah dalam pengukuran pembangunan ekonomi secara umum HDI yang paling utama adalah pendidikan dimana ketika seseorang berpendidikan tinggi dapat menentukan kesehatan serta pendapatannya pun meningkat.		

Dari masing-masing perbedaan tersebut sebenarnya setiap indeks mempertimbangkan melalui sisi yang paling urgen menurut konsep yang menjadi dasar masing-masing. Keduanya saling melengkapi dalam melihat secara lintas dimensi meskipun bebrapa indeks pada I-HDI juga berasal dari indeks yang dibangun HDI. Keduanya sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang mengarah pada konsep pembangunan manusia yang berkeadilan, hanya saja pada konsep HDI berakhir pada nilai tercapai atau tidaknya suatu pembangunan, sementara I-HDI melihat melalui bagiamana agar pencapaian angka tersebut membawa dampak pada nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan *Syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- dihitung dengan menggunakan perhitungan I-HDI pada masingmasing indeks yang diurutkan berdasarkan kebutuhan manusia paling mendasar yaitu hifzu māl, hifzu dien, hifzu nafs, hifzu 'aql, hifzu nasl, menunjukkan pencapaian angka yang relatif tinggi secara persentase pada beberapa komponen meskipun, belum secara total dari keseluruhan. Hasil pada masing-masing indikator tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta telah mencapai pembangunan manusia yang sesuai berdasarkan barapan maqāṣid syarī'ah.
- 2. Hasil dari perhitungan antar HDI dan I-HDI menunjukkan perbandingan yang signifikan berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah* diantaranya yaitu: Sebaran nilai I-HDI lebih bervariatif dari pada HDI namun keduanya mencapai *kemaslahatan* yang sesuai dengan harapan *Maqāṣid Syarī'ah*. Selain itu, terjadi perbedaan ukuran standar untuk status pembangunan antara HDI dan I-HDI. Pengukuran yang digunakan berbeda karena beberapa indikator yang digunakan juga terdapat perbedaan. Sehingga konsep standar

yang digunakan oleh HDI tidak bisa digunakan oleh I-HDI dalam beberapa kasus tertentu.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pembangunan manusia secara islami (I-HDI) adalah :

- 1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih berkoordinasi pada Polresta dalam menjamin keamananan penduduk bukan sekedar menurunkan angka kriminalitas semata tetapi, juga dapat memastikan bahwa setiap penduduk berhak merasa aman dilingkungannya. Serta dapat mengatasi dan memberi solsusi yang tepat untuk permasalahan ketimpangan dan kesenjangan sosial penduduk, sehingga pendapatan penduduk dapat ditingkatkan setiap tahunnya melalui program-program pemerintah yang mendukung.
- 2. Pemerintah Kota Yogyakarta bisa menerapkan konsep pencapaian pembangunan manusia sesuai konsep I-HDI tanpa harus merubah sistem yang yang sudah ada. Fokus memperhatikan pembangunan manusia melalui indikator-indiktaor usulan I-HDI seperti kepemilikan harta, pendistribusian harta penduduk dan mengurangi angka kriminalitas. Sementara sebagian indikator lainnya seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga sudah digunakan oleh Kota Yogyakarta dalam mengukur pembangunan manusia melalui konsep HDI.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser, 2008, Maqasid Al-Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach, London: International Institue Of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, 2015, *Maqasid Al-Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Alih Bahasa Rosidin Dan Ali Abd El-Muu'min,2015, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah, Cet.1, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Basuki, Tri , dkk, 2015, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014, (Studi Kasus Kab/Kota D I Yogyakarta).
- Berita Resmi Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta No. 27/05/34/Th.XIX,5 Mei 2017, diakses pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 jam 11.15 WIB.Bhakti, Nadia Ayu, dkk, 2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode* 2008-2012, Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Volume 18, Nomor 4.
- Bintang.P, Mohammad, dkk., 2015, "Determinan Indeks Pembangunan Manusia: Analisa Pendekatan Maqashid Syari'ah Al-Ghazali (Studi Kasus: Negara- NegaraOKI) *Jurnal Eksyar*, Volume 02, Nomor 02.
- Chapra, M. Umer, 2000, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press.
- Cholili, Fatkhul Mufid, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)", Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Destilunna, Fauziah Gitri, Ismaini Zain, 2015, "Pengaruh Dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan, Serta Umkm Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel Dan Biplot", *Jurnal Sains Dan Seni Its* Vol. 4, No.2.
- Dewi, Santika, Nyoman Lilya, I Ketut Sutrisna, 2014, "Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Issn:2303-0178, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 3.
- Feriyanto, Nur, 2014, Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haq, Hamka, 2007, Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendri Anto, MB.,2010, "Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI)to measure Development In OIC Countries", *IRTI-Journal* Vol.19. No.2.2010.
- Https://www.Bps.go.id./Subject/23/kemiskinan-dan ketimpangan.html diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Oktober 2018, pukul 22.39 WIB.

- Hubberman, Mathew B.Miles,1992, *Qualitative Data Analysis Indeks*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Human Development Report, 2009-2014.
- Idrus, Muhammad, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogakarta: Penerbit Erlangga.
- Jaya Bakri, Asafri, 1996, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, Karimatul, 2015, "Ekonomi Syari'ah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Kapitalisme Global, (Revitaformasi Hukum Ekonomi Pembangunan Islam)", *Al-Manahij* Vol Ix No 2.
- Kotambunan, Lavenia, dkk,2016," Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara (Dalam Tahun 2005-2014)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 01.
- Lumbantoruan, Eka Pratiwi, Paidi Hidayat, 2014, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 2 No. 2.
- Maratade, Siske Yanti,Dkk, 2016, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan IndeksPembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara(Studi Pada Tahun2002-2013)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01,
- Maulana, Ridwan, Prasetyo Ari Bowo, 2013, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007- 2011", *Jejak Journal Of Economics And Policy* Vol.6, No. (2). Metode Kulaitatif.
- Moleong, J Lexy, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmalasari, Ratih, 2017, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal Dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014)",Issn: 2339-2541 *Jurnal Gaussian*, Volume 6, Nomor 1.
- Prastowo, Andi, 2011, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, Mahendra, Putu Gede. Dkk, 2015, "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia", Issn: 2302 8556, *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No. 3. Universitas Udayana.

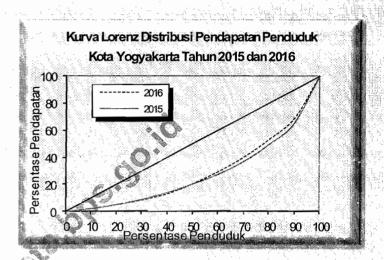
- Rafsanjani, Haqiqi, 2014, Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia", TESIS, Surabaya: UNAIR.
- Rahmat, Basuki ,2016, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Indeks Pembangunan Msnusia pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2014, Tesis Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM.
- Sarkoro, Hastu, 2016,"Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2012-2014), *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol.1no.1.
- Setiawan,Bhakti, Mohammad, Abdul Hakim,2013, "Indeks Pembangunan Manusia Indonesia", *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1.
- Siswandi,2015, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal", *Assets*, Volume 5, Nomor 2.
- Smith, and Todaro d2015, "Economic Development 12th Edition. Pearson.New Jersey.
- Sugiono, 2014, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, M, 2013, *Ilmu Hukum Profetik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Syauqi Beik, Irfan, 2016, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- United Nation Development Program (UNDP), 1990.
- Wicaksono, Nur Muhammad., Tanpa Tahun, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah terhadap Peningkatan PDRB Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

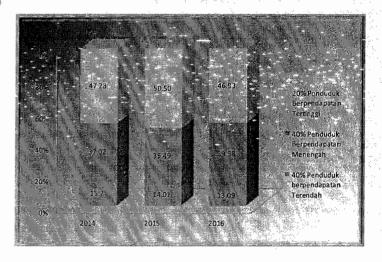
Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015, walaupun tidak terlalu signifikan. Secara kualitatif hal tersebut terindikasikan dengan gambaran kurva Lorenz tahun 2016 yang bergeser sedikit ke arah garis diagonal dibandingkan dengan gambaran kurva Lorenz tahun 2015.

Secara kuantitatif ukuran tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dapat dilihat dari angka Gini Ratio. Pada tahun 2016, Gini Rasio Kota Yogyakarta tercatat sebesar 0,4214, lebih rendah 0,0217 poin dibandingkan tahun 2015. Halini berarti distribusi pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun 2016 lebih merata dibandingkan tahun 2015.

Pada tahun 2016 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 13,09 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 39,98 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 46,93 persen. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta tahun 2016 tergolong berketimpangan sedang atau moderat, dimana kelompok penduduk berpenghasilan rendah menerima diantara 12 sampai 17 persen dari total pendapatan.



Perkembangan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kriteria Bank Dunia, 2014 - 2016



Gini Ratio dan Kriteria Ketimpangan di Kota Yogyakarta, 2014 - 2016

		Tahun	
Uraian	2014	2015	2016
Gini Rasio	0.3959	0.4431	0.4214
Kriteria	Moderat	Moderat	Moderat

Rupiah) 2016	12406297	1034767	4246055	5600211	253773	12437129	12440131	23538102
ogvakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) 2011 - 2011	11830616	1003229	4112487	5309652	238387	12121516	12222872	22393015
it Pengeluaran 2014	11264629	983125	3891221	5131273	222367	11585958	11770809	21307764
n 2010 Menuru 2013	10720198	886746	3726693	4867326	198900	10776457	10936763	20239558
asar Harga Konsta 2012	10216079	807357	3511733	4634371	189850	10357456	10527771	19189075
yakarta Atas Da 2011	9623980	744063	3308482	4401120	190032	9785956	9847543	18206090
PDRB Kota Yog 2010	8959330	656396	3162639	4208387	252896	9500453	9537948	17202154
Kategori PDRB Menurut Pengeluaran	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4. Pembentukan Iviodal Tetap Domestik Rnito	5. Perubahan Inventori	6. Ekspor Barang dan Jasa	7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8. PRODUK DOMESTIK BRUTO

Art.	Variabel Kemiskinan	2000	2010		emiskina	n Kota Y	ogyakart	a	2046	2047
		2009	2	2011				2015-		
Garis Ken	niskinan (Rp/Kap/Bln)	265168	290286	314311	333232	353602	366520	383966	401193	423815
Jumlah Pe	enduduk Miskin (dalam 000)	45.3	37.8	37.7	37.4	35.6	35.6	36	32.06	32.2
Persentas	se Penduduk Miskin	10.05	9.75	9.62	9.38	8.82	8.67	8.75	7.7	7.64
Indeks Ke	dalaman Kemiskinan(P1)	1.91	1.29	1.19	1.57	1.24	1.14	1.06	1.05	1.58
Indeks Ke	parahan Kemiskinan(P2)	0.58	0.36	0.24	0.37	0.27	0.26	0.23	0.19	0.48

Pembangunan Manusia | Kota Yogyakarta

IPM KOTA YOGYAKARTA 2011-2016

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Angka	Tahun	74,02	74,04	74,05	74,05	74,25	74,30
Harapan				1		1	,
Hidup							
(AHH)		-					
Harapan	Tahun	15,75	15,82	15,89	15,97	16,32	16,81
Lama				1		1	
Sekolah							
(HLS)							
Rata-rata	Tahun	11,01	11,22	11,36	11,39	11,41	11,42
Lama		1		j	1		
Sekolah		1					
(RLS)							
Pengeluaran	Ribu	16.497	16.498	16.645	16.775	17.317	17.770
Perkapita	Rupiah						
disesuaikan							
IPM	0-100	82,98	83,29	83,61	83,71	84,26	85,32
Pert IPM_	%						

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA DATA TAHUN 2015

	AN	HIDUP + MATI		12	70	290	115	149	138	236	226	148	204	722	367	175	104	390	578	206	311	4,005	
	LAKI-LAKI + PEREMPUAN	MATI			- 0	2	3	-	-	2	2	0	2	2	-	0			7	4	3	33	8.2
	LAKI-LI	HIDUP	10	62	78	288	112	148	137	234	224	148	202	225	366	175	103	389	571	202	308	3,972	
Z,		HIDUP + MATI	6	38	40	151	55	62	92	120	121	76	96	111	183	92	48	189	296	104	162	2.037	
JUMLAH KELAHIRAN	PEREMPUAN	MATI	8	-		-								1	T		-		4		, ,	13	6.4
JUML	4	HIDUP	7	37	40	150	55	97	92	120	121	92	96	110	182	92	47	189	200	101	164	NCO C	4,047
		HIDUP + MATI	9	25	38	139	09	70	62	116	105	72	108	116	184	83	56	201	280	707	140	000	006'1
	LAKI-LAKI	MATI	5				3	-	1	2	2		2	-			0		- 0	2		2	20
		HIDUP	4	25	38	138	25	69	61	114	103	72	106	115	184	83	26	000	7007	279	101	147	1,948
	PLISKESMAS		3	Danurejan 1	Danurejan 2	Gondokusuman 1	Gondokusuman 2	Gondomanan	Gedongtengen	Jetis	Kotagede 1	Kotagede 2	Kraton	Mergangsan	Mantriieron	Nnamnilan	- Sample of the	rakudidilidii	Tegalrejo	Umbulharjo 1	Umbulharjo 2	Wirobrajan	
	KECAMATAN		2	Danurejan	Danurejan	Gondokusuman	Gondokusuman	Gondomanan	Gedongtengen	Jetis	Kotagede	Kotagede		dsan				14 Pakualaman	Tegalrejo	Umbulharjo	Umbulharjo		MI AH (KAB/KOTA)
	NO		1	1	2	3 (4 6	5 6	9	7 Je	8 Ka	9 Ko	10 Kraton	11 Me	12 Ma		2 0	100	15 Teg	16 Umb	17 Umb		AH

Control Cotos Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakana

Katarandan:

JUNILAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA DATA TAHUN 2015

							JUMLAH KEMATIAN	MATIAN					
NO KECAMATAN	PUSKESMAS		LAKI-LAKI	AKI			PEREMPUAN	PUAN		2	AKI - LAKI + F	LAKI - LAKI + PEREMPUAN	
		NEONATAL	BAYTa	ANAK	BALITA	NEONATAL	BAYIB	ANAK	BALITA	NEONATAL	BAYTS	ANAK BALITA	BALITA
	9	,	8	9	2	8	01	94	11	12	13	14	115
Danurajan	Danuelan 1	0	0	0	0	0	1	0	-	0	1	0	+
Canuraian	Danueian 2	0	0	0	0		1	0	2	1	1	0	CH
Gondokusuman	Gondokusuman †	-	60	0	7	-	1	0	2	2	4	0	9
Gandokusuman	Gondokusuman 2	-	-	0	24	0	0	0	0	The second second	1	0	64
Gondomenan	Gondonanan	2	60	0	10	0	0	0	0	2	(0)	0	10
Gedungtengen	Gedongtengen	60	m	0	9	0	0			6			Por
2000		-	0	0	7	0	0	0	0	-	10	0	
Kotacede	Kotagede 1	1	2	-	7	0	0		0		24		
Kotapede	Kotagede 2	2	2	0	7	0	-	0			0	0	
Kraith	Kraton	0	0	0	0	0	0	0					0
TESTINATION III	Mercianosan	-	-	0	CA	-	1	0			2	2 0	0
C Northeast	Manchieron	-	**	-	60	60	3	0		9			(7)
Campilan	Ngampilan	0	0	0	0	0	0				0	0	1
14 Pakualaman	Pakualaman	0	0	0	0	-				000		1	- 0
15 Tecaheio	Tegalhejo	0	0	0	0				0	7	-		
15 Umbulhario	Umbulharjo 1	-	-	0						00	70	40	- 0
17 Undulhano	Umbulhario 2	0	0	0		0	0		0	3	0	0 0	00
TE Minchigan	Windralan		-	0	2							7	0
JUNEAH (KABINDTA)		15	21	2	38	O)						33	
WENCH ICHTHITING I TOURS	DANGE OF THE PROPERTY OF THE P	7.70	10.78	1.03	19.51	4.45	5 5.93	-	.98 12	12.35 6	6.04	8.31	00.01

Sumber: Selss Kessehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kessehatan Kota Yogyakarta

Ketanrangan:
- Angka Kematian (dilaponkan) tersebut di alas belum tentu menggambarkan AKNIAKB/AKABA yang sebenamya di populasi
- Angka Kematian (dilaponkan) tersebut di alas belum tentu menggambarkan AKNIAKB/AKABA yang sebenamya di populasi
(a) menupakan kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

TABEL 4

			A T A T STANDARD																					
		JAN	HIDUP + MATI	12	62	29	269	86	126	137	277	203	165	170	226	372	155	101	417	544	183	290	3.862	
		LAKI-LAKI + PEREMPUAN	MATI	11	0	0	-	_	_	2	2	0	-	-	4	-	0	0	2	ო	0	2	21	5,4
		LAKI-LA	HIDUP	10	62	67	268	97	125	135	275	203	164	169	222	371	155	101	415	541	183	288	3.841	
KESMAS	7		HIDUP + MATI	6	30	36	132	48	61	63	134	92	06	88	97	193	84	61	210	257	83	148	1.907	
JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATENIKOTA YOGYAKARTA DATA TAHUN 2016	JUMLAH KELAHIRAN	PEREMPUAN	MATI	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	_	0	0	0	0	~	0	0	0	4	2,1
ELAMIN, KECAM YOGYAKARTA 2016	JUMI		HIDUP	7	30	36	132	48	61	19	134	95	06	87	16	193	84	61	209	257	83	148	1.903	
MENURUT JENIS KEI KABUPATENKOTA Y DATA TAHUN 2			HIDUP + MATI	9	32	31	137	90	65	74	143	111	75	82	129	179	71	40	207	287	100	142	1.955	19 y
AHIRAN MENU KABUF D		LAKI-LAKI	MATI	5	0	0	~	_	~	0	2	0	~	0	4	_	0	0	-	n	0	2	17	8,7
JUMLAH KEL			HIDUP	4	32	31	136	49	64	74	141	111	74	82	125	178	7.1	40	206	284	100	140	1.938	LAPORKAN)
		NAMA	PUSKESMAS	. 8	Danurejan 1	Danurejan 2	Gondokusuman 1	Gondokusuman 2	Gondomanan	Gedongtengen	Jetis	Kotagede 1	Kotagede 2	Kraton	Mergangsan	Mantrijeron	Ngampilan	Pakualaman	Tegalrejo	Umbulharjo 1	Umbulharjo 2	Wirobrajan		ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)
		KECAMATAN		2	Danurejan	Danurejan	Gondokusuman	Gondokusuman	Gondomanan	Gedongtengen	Jetis	Kotagede	Kotagede	Kraton	Mergangsan	Mantrijeron	Ngampilan	Pakualaman	Tegalrejo	Umbulharjo	Umbulharjo	Wirobrajan	JUMLAH (KAB/KOTA)	LAHIR MATI PER
		O Z		7	1 0	2	<u>ი</u>	4	5	9	· ゔ ト	· ω	٥	10 X	τ Σ	12 M	13	14 P	15 T	16 U	17 U	18	JUMLA	ANGKA

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

TABEL 5

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA DATA TAHUN 2016

								JUMLAH KEMATIAN	EMATIAN					
2	KECAMATAN	PUSKESMAS		LAKI - LAKI	LAKI			PEREMPUAN	NPUAN		ר	AKI - LAKI +	LAKI - LAKI + PEREMPUAN	7
			NEONATAL	BAYla	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYIa	ANAK BALITA	BALITA	NEONATAL	BAYla	ANAK BALITA	BALITA
٢	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15
-	Danurejan	Danurejan 1	0	0	0	0	2	ဂ	2	သ	2	ဇ	2	5
~	Danurejan	Danurejan 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
نہ	Gondokusuman	Gondokusuman 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gondokusuman	Gondokusuman 2	_	_	0	~	0	0	0	0	_	_	0	_
വ	Gondomanan	Gondomanan	7~~	_	0	_	0	0	0	0	_	_	0	-
ဖ	Gedongtengen	Gedongtengen	0	7	0	-	_	-		2		2	And the second s	3
_	Jetis	Jetis	0	0	0	0	0	_	0	~			0	-
ω	Kotagede	Kotagede 1	_	2	0	2	-	2	0	2	2	4	0	4
တ	Kotagede	Kotagede 2	0	0	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_
10	Kraton	Kraton	0	_	_	2	0	0	0	0	0	-	-	2
11	Mergangsan	Mergangsan		_	2	3	_	_	0	-	2	2	2	4
12	Mantrijeron	Mantrijeron	_	_	0	τ	က	ιΩ	0	5	4	9	0	9
13	Ngampilan	Ngampilan	0	_	0	_	_	_	-	2	-	2	-	ဇ
14	Pakualaman	Pakualaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tegalrejo	Tegalrejo	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	_	-
16	Umbulharjo	Umbulharjo 1	_	က	0	က	0	_	0	-	-	4	0	4
17	17 Umbulharjo	Umbulharjo 2	2	7	_	က	0	0	0	0	2	2	-	က
9	18 Wirobrajan	Wirobrajan	7	_	0	-	0	0	0	0	1	1	0	_
MUS	JUMLAH (KAB/KOTA)	,	6	15	5	20	6	15	5	20	18	30	10	40
ANG	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	PORKAN)	5	8	3	10	5	8	3	11	9	8	က	10

Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Keterangan: - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

- a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Tabel 2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2014-2015

Vobusatos/Vota	A	4H 3	E	YS	М	YS -	Penge	uaran	1 . I	PM:	D. C. L.
Kabupaten/Kota	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	Pertumbuhan
D I YOGYAKARTA	74,50	74,68	14,85	15,03	8,84	9,00	12.294	12.684	76,81	77,59	1,02
Kulon Progo	74,90	75,00	13,27	13,55	8,20	8,40	8.480	8.688	70,68	71,52	1,19
Bantul	73,24	73,44	14,62	14,72	8,74	9,08	13.921	14.320	77,11	77,99	1,14
Gunung Kidul	73,39	73,69	12,82	12,92	6,45	6,46	8.235	8.336	67,03	67,41	0,56
Sleman	74,47	74,57	15,64	15,77	10,28	10,30	14.170	14,562	80,73	81,20	0,59
Kota Yogyakarta	74,05	74,25	15,97	16,32	11,39	11,41	16.755	17,317	83,78	84,56	0,93

Keterangan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir

EYS : Expected Years of Schooling (Harapan Lama Sekolah)
MYS : Mean Years of Schooling (Rata-rata Lama Sekolah)

2	
4	
R	
N N	

KASUS	LAPOR
PENGEROYOKAN	105
KEBAKARAN	14
PEMALSUAN SURAT	10
PERZINAHAN	7
PERJUDIAN	20
PENGHINAAN	13
PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	13
PENGANIAYAAN	197
PENCURIAN	302
CURAT	181
CURAS	71
CURANMOR	208
PEMERASAN	29
PENGGELAPAN KEKKIM.	129
PENIPUAN	442
PENGRUSAKAN (CONTINUE OF THE	45
KDRT	33
PORNO/CABUL	6
SAJAM	22
FIDUSIA	46
ORANG MD	35
PENEMUAN BAYI	1
CEGAH / HALANGI PROSES PENYIDIKAN	1
PERCOBAAN PENCURIAN	5

PERCOBAAN CURAS	1
PENEMUAN BOM	2
BAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR	1
MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IJIN	4
PEMERKOSAAN	2
PEMBUNUHAN	1
RUMKIM	7
WANITA MELAHIRKAN DAN BAYI MENINGGAL DUNIA	1
PERCOBAAN CURANMOR	1
LAKA KERETA API / LAKA KA	2
BAWA LARI ANAK	1
PERCOBAAN CURAT	4
BENCANA ALAM	1
ORANG HILANG	1
HAKI	1
PERLINDUNGAN ANAK	5
PENEMUAN MAYAT	2
PENGANCAMAN	3
PERCOBAAN PEMERKOSAAN	1
LAKA KERJA	3
TEMU OROK BAYI	2
KETERANGAN PALSU	2
PALSU IDENTITAS	. 1
PEMBAKARAN	1
GANTUNG DIRI	3
PENEMUAN ORANG SAKIT	—

.VANDALISME	1
RAMPAS HAK ASUH	1
PELECEHAN SEXUAL	1
TERSENGAT LISTRIK	1
ANAK MENINGGALKAN RUMAH	1
PENCULIKAN	1
PENADAHAN	1
PENELANTARAN DALAM KELUARGA	1
PELANGGARAN HAM	2
	2002

ŀ

.5
Ŋ
V
\preceq
20
11
•
X
15
X.
,

Link.

KASUS	LAPOR
PENGEROYOKAN	74
PEMBAKARAN	1
KARENA ALPA MENIMBULKAN KEBAKARAN	6
PEMALSUAN SURAT	10
PERZINAHAN	7
PERKOSAAN	2
PERMAINAN JUDI / PERJUDIAN	25
PENGHINAAN / PENCEMARAN NAMA BAIK	6
PENCULIKAN	#
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	5
KEJAHATAN TERHADAP JIWA ORANG / PEMBUNUHAN	-
PENGANIAYAAN BERAT	4
PENGANIAYAAN RINGAN	170
PENCURIAN BIASA	194
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	189
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	43
CURANMOR	167
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	19
PENGGELAPAN	107
PENIPUAN / PERBUATAN CURANG	275
MENGHANCURKAN ATAU MERUSAK BARANG / PENGRUSAKAN	43
PENADAHAN	0
UU POKOK AGRARIA (MSLH AGRARIA) / RUMKIM	9
PERLINDUNGAN ANAK	6
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)	25
PORNOGRAFI – CABUL	3

PENYALAHGUNAAN SENJATA API / BAHAN PELEDAK – SAJAM	29
	56
PENGGELAPAN DALAM JABATAN	12
GANTUNG DIRI	4
ORANG MD	30
MENCABUT HAK ANAK DARI ORANG TUA KANDUNG	. 1
KEJAHATAN TERHADAP JIWA	1
MERAMPAS KEMERDEKAAN	0
MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	4
MERUSAK KESOPANAN	2
PENEMUAN BAYI	T
PERCOBAAN CURANMOR	2
PENELANTARAN KELUARGA	4
PENEMUAN MAYAT	4
PENGANCAMAN	8
UU KESEHATAN	1
ORANG TERSENGAT LISTRIK	2
LAKA KERETA API	4
PERLINDUNGAN KONSUMEN	1
PELECEHAN SEXUAL	0
POHON TUMBANG	0
LAKA KERJA	1
PENEMUAN OROK BAYI	2
MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL DAN MUCIKARI	2
PERCOBAAN PEMBUNUHAN DAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	1
PERCOBAAN CURAT	3
VANDALISME	1

MIRAS	4
LARIKAN ISTRI ORANG	2
PENEMBAKAN	1
PENCURIAN DALAM KELUARGA	1
HAKI	1
ORANG HILANG	T
PENEMUAN MAYAT BAYI	1
DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMBUNUH ATAU MENGHILANGKAN HEWAN MILIK	
ORANG LAIN	-1
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU	2
PERCOBAAN PENCURIAN	
PERCOBAAN CURAS	
MENGHASUT	+
KEKERASAN TERHADAP ANAK	1
PENEMUAN UANG PALSU	1
MEMBAWA LARI DAN ATAU MENGUASAI ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN ANAK KANDUNGNYA	H
MERAMPAS KEMERDEKAAN	1
ORANG JATUH KE DALAM SUMUR	1
ANAK TENGGELAM	1
JUMLAH	1592

FI C

3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Nama Mahasiswa/NIM : Tiara Rochmawati / 15913197

Kosentrasi : Ekonomi Islam

Tempat / Tanggal lahir : Mahato Sakti, 08 Agustus 1993 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

Alamat Asal : Riau

Nomor Telepon/HP : 082326697378

Email/Facebook : amndatiara08.tr@gmail.com

Kesehatan : Baik
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Tanggal Masuk UII : 12 Maret 2016 Tahun Tamat UII : -2018

Pembimbing Tesis I : Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

Angkatan : 2016

Biaya Kuliah : Beasiswa / Orang Tua / Sendiri / Lain-lain *)

Jalur Masuk : Ujian Seleksi / TanpaUjian Seleksi *)
Asal SD : SDN 014 Tambusai Utara, Provinsi Riau
Asal MTS : MTSN Bahrul Ulum, Provinsi Riau

Asal MA : MAS Dar-El Hikmah Pekanbaru, Provinsi Riau

Asal SI : UIN-Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Prodi SI : Manajemen Dakwah Jurusan : Lembaga Keuangan Islam

Pengalaman Organisasi :

- 1. PRAMUKA UIN-SUKA Yogyakarta.
- 2. SCREAMD (Study Club Research Manajemen Dakwah).
- 3. IKAPDH (Pengurus Ikatan Alumni Pesantren Dar-El Hikmah Riau-Yogyakarta).
- 4. HMPRY (Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau-Yogyakarta).